



KEMENTERIAN PERTANIAN

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

LAPORAN KINERJA

BALAI VETERINER JAYAPURA
TAHUN 2024



Disusun Oleh:
Tim Balai Veteriner Jayapura

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan kinerja ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Balai Veteriner Jayapura tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan serta pencapaian yang telah diraih selama periode tahun 2024.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai berbagai program, kegiatan, serta hasil yang telah dicapai dalam rangka meningkatkan kinerja sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Balai Veteriner Jayapura yang telah ditetapkan. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jayapura, 20 Januari 2025

Kepala Balai Veteriner Jayapura



drh. Tri Juwianto
NIP. 197801202009011010

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Peningkatan Status Eselonering	2
1.1.2. Letak/Posisi Pulau Papua	3
1.1.3. Sebaran Populasi Ternak dan Produksi Daging	4
1.1.4. Kesehatan Hewan	8
1.1.5. Status Bebas Penyakit Hewan Menular Strategis	10
1.1.6. Konsumsi Protein Hewani	13
1.2. Tugas dan Fungsi Balai Veteriner Jayapura	14
1.3. Struktur Organisasi	17
1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia	17
1.5. Dukungan Anggaran	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	21
3.1.1. Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	21
3.1.2. Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen	24
3.1.3. Kegiatan Teknis Mendukung Kinerja Organisasi	25
3.1.4. Analisis Keberhasilan	28
3.2. Realisasi Anggaran	28
BAB IV PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Populasi Ternak Provinsi Papua Tahun 2019-2021	4
Tabel 2. Data Populasi Ternak Prov.Papua Barat Tahun 2019-2021	5
Tabel 3. Data Konsumsi Protein Hewani Masyarakat Papua dan Papua Barat.....	13
Tabel 4. Data Pegawai Balai Veteriner Jayapura	16
Tabel 5. Alokasi Anggaran per-Akun Tahun Anggaran	17
Tabel 6. Kinerja Tahunan.....	18
Tabel 7. Histori Revisi Anggaran	19
Tabel 8. Detail Nilai IKM Semester I per-Unsur	21
Tabel 9. Detail Nilai IKM Semester II per-Unsur	22
Tabel10. Realisasi Pengujian Pengendalian dan Identifikasi Penyakit Hewan	23
Tabel11. Realisasi Pengadaan Sarana Bidang Kesehatan Hewan (alat laboratorium)	24
Tabel12. Realisasi Kegiatan Peningkatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner.....	25
Tabel13. Pengadaan dan Distribusi Ternak serta Pendukung	26
Tabel14. Perbandingan Realisasi Pengujian Pengendalian dan Identifikasi Penyakit Hewan serta Peningkatan Keamanan dan Mutu oroduk Hewan	27
Tabel15. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023.....	28
Tabel16. Hasil Perhitungan Efisiensi	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Bisnis Balai Veteriner Jayapura.....	15
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Balai Veteriner Jayapura.....	16

DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja	Lampiran I
Dokumen Perencanaan	Lampiran II
Laporan Keuangan.....	Lampiran III
Laporan Barang Milik Negara	Lampiran IV
Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Lampiran V

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Veteriner Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan berlandaskan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tahun Anggaran 2023 Balai Veteriner Jayapura diberikan mandat untuk melaksanakan pengelolaan anggaran dengan diserahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan nomor SP DIPA- 018.06.2.618061/2024. Dalam perjalanan waktu selama T.A 2024 mengalami 11 (Sebelas) kali revisi dengan anggaran akhir sebesar Rp **2.915.314.000,00**, dengan capaian realisasi sebesar Rp **2.789.130.315,00** atau sebesar **95,67%**, dan nilai efisiensi sebesar 60,82%. Nilai efisiensi tersebut masuk dalam kategori/predikat **cukup** dengan dasar pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021, tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Loka Veteriner Jayapura dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdapat 2 (dua) sasaran kinerja yang menjadi target untuk dicapai, yakni : (1) 1) Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima dan (2) Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen. Berdasarkan 2 (dua) sasaran kinerja tersebut, realisasi capaian kinerja Balai Veteriner Jayapura masuk dalam kategori/predikat **sangat berhasil** yakni Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima dan Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen Internal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Veteriner Jayapura merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Loka Veteriner Jayapura, dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dasar pertimbangan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Veteriner Jayapura berawal dari pembentukan Loka Veteriner Jayapura berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.010/1/2018 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Veteriner Jayapura, pendirian Loka Veteriner Jayapura saat itu adalah untuk mendukung percepatan peningkatan produksi ternak dan penjaminan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Pulau Papua. Kehadiran Balai Veteriner Jayapura merupakan upaya untuk lebih mendekatkan dan menghadirkan pelayanan veteriner yang lebih nyata di tengah masyarakat. Dinamika politik dan sosial kemasyarakatan yang terus berkembang di seluruh wilayah pulau Papua salah satunya dengan pembentukan beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB) pada Tahun 2022, yang salah satu tujuannya adalah peningkatan pelayanan publik diatur dalam beberapa regulasi yaitu:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, mencakup 4 (empat) kabupaten, yaitu: Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, mencakup 8 (delapan) kabupaten, yaitu: Kabupaten Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Mimika, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, mencakup 8 (delapan) kabupaten, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, dan Nduga.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Barat Daya, mencakup 6 (enam) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Maybrat, Raja Ampat, Tambrau, Sorong, Sorong Selatan dan Kota Sorong.

Dengan adanya pemekaran provinsi dengan dibentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) ini secara langsung berdampak terhadap wilayah pelayanan Loka Veteriner Jayapura yang semula 2 (dua) provinsi menjadi menjadi 6 (enam) provinsi yang menjadi wilayah kerja.

Penambahan provinsi secara langsung akan berkorelasi dengan adanya penambahan luas cakupan wilayah kerja/tugas Balai Veteriner dalam menjamin pelaksanaan pelayanan pengujian serta menambah ruang lingkup pengujian sesuai kebutuhan atau permintaan masyarakat. Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas dengan memperhatikan berbagai dinamika politik dan sosial keamasyarakatan di wilayah Pulau Papua dan kebutuhan organisasi sehingga Loka Veteriner Jayapura beralih status/peningkatan eselonering menjadi Balai Veteriner Jayapura

Beberapa faktor yang menyebabkan perubahan status eselonering menjadi Balai Veteriner Jayapura menjadi penting dan posisi sebagai UPT strategis yang berlokasi di Pulau Papua adalah sebagai berikut :

1.1.1. Peningkatan Status Eselonering

Peningkatan status eselonering UPT memiliki sejumlah manfaat strategis bagi organisasi diantaranya:

- a. Peningkatan Efektivitas Pelayanan, memperkuat kemampuan UPT dalam meningkatkan dan memberikan layanan yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas kepada masyarakat, dan memperluas

jangkauan layanan sesuai dengan penambahan cakupan wilayah kerja.

- b. Peningkatan Kewenangan, dengan peningkatan status eselonering UPT memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya kegiatan kegiatan yang mendukung program strategis instansi induk.

1.1.2. Letak/Posisi Pulau Papua

Pulau Papua adalah pulau terluas di Indonesia dan nomor dua didunia setelah *Greenland*, menempati posisi sebagai salah satu pulau terluar yang memiliki perbatasan laut dan darat secara langsung dengan negara di Kawasan, yaitu sebelah timur berbatasan darat dengan Papuanugini, sebelah selatan berbatasan laut dengan Australia dan Selandia Baru, sebelah utara berbatasan laut dengan Filipina dan Jepang. Perairan disekitar Pulau Papua juga merupakan salah satu urat nadi perdagangan internasional yang menjadikan Pulau Papua rentan terhadap sengketa perbatasan dan ancaman keamanan yang berdampak terhadap instabilitas baik di dalam negeri maupun kawasan, sehingga tata kelola sumber daya alam, wilayah perbatasan dan pertahanan yang handal sangat diperlukan.

Menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015), ancaman nyata merupakan bentuk ancaman yang menjadi **prioritas** dalam penanganannya, meliputi: terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, **wabah penyakit**, serangan siber dan spionase, serta peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Melihat uraian tersebut, jika di dekatkan dengan issue *one health*, maka wabah penyakit hewanpun menjadi suatu hal yang prioritas untuk dikelola.

Melihat posisi Pulau Papua dan meningkatnya kebutuhan Masyarakat berimplikasi terhadap meningkatnya aktivitas perdagangan antar daerah bahkan antar negara. Adanya aktifitas perdagangan pada sektor peternakan antar daerah secara bersamaan meningkatkan peluang masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular dari daerah lain yang tidak mengenal batas daerah (*transboundary animal diseases*). *Transboundary Animal Diseases* merupakan penyakit epidemi yang sangat menular dan memiliki potensi penyebaran yang cepat, serta tidak terpengaruh batasan negara. TADs menyebabkan tingkat kematian (*mortalitas*) dan morbiditas yang tinggi pada hewan, memiliki dampak sosial ekonomi yang serius dan kadang-kadang berdampak pada kesehatan masyarakat. Konsekuensi dari potensi *Transboundary Animal Diseases* memiliki dampak yang cukup besar hingga berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Beberapa potensi tersebut diantaranya : (a) mengancam ketahanan pangan; (b) peningkatan tingkat kemiskinan khususnya di komunitas miskin yang memiliki ketergantungan tinggi pada peternakan; (c) menyebabkan kehilangan produksi produk peternakan; (d); meningkatkan biaya produksi peternakan secara signifikan; € menyebabkan gangguan serius pada perdagangan ternak dan produknya (f) konsekuensi terhadap kesehatan masyarakat; (f) menyebabkan konsekuensi pada lingkungan; dan (g) menyebabkan kesakitan dan penderitaan pada hewan yang terinfeksi.

Resiko *transboundary animal diseases* tersebut memerlukan tindakan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan yang efektif dan sistematis. Salah satu usaha tersebut adalah peningkatan kemampuan dalam deteksi dini penyakit hewan eksotik serta kemampuan dalam pemeriksaan kesehatan hewan dan produk asal hewan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan tugas dan fungsi UPT Veteriner.

1.1.3. Sebaran Populasi Ternak/Unggas dan Produksi Daging Ternak /Unggas di Pulau Papua

Sub sektor peternakan terus berkembang, digambarkan dengan sebaran dan jumlah populasi ternak/unggas, serta data produksi daging ternak/unggas baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat beserta DOBnya. Rincian data menurut Badan Pusat Statistik Papua dan Papua Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Data Populasi Ternak Unggas Provinsi Papua Tahun 2020-2022

Jenis Ternak	Jumlah Populasi Ternak		
	2020	2021	2022
Sapi Potong	117.098	121.651	124.009
Kerbau	778	808	815
Kuda	2.715	2.772	2.832
Kambing/domba	71.619	74.104	76.893
Babi	959.181	1.022.717	993.351
Ayam Ras Petelur	996.886	613.407	1.095.362
Ayam Ras Pedaging	5.465.318	6.073.749	5.982.475
Ayam Buras/Kampung	2.570.504	2.771.834	2.885.176
Itik	180.431	188.662	193.774

Sumber: Statistik Pertanian dan Pangan Provinsi Papua, data diolah 2024.

Tabel 2
Data Produksi Daging Ternak/Unggas Provinsi Papua
Tahun 2021-2023

Jenis Ternak	Jumlah Produksi Daging (Kg)		
	2020	2022	2023
Sapi Potong	3.699.504	2.658.060	1.150.888
Kerbau	15.719	32.101	7.970
Kuda	16.950	14.850	-
Kambing/domba	261.665	207.194	93.382
Babi	9.116.240	8.638.116	1.286.947
Ayam Ras Petelur	767.418	802.463	161.720
Ayam Ras Pedaging	5.821.836	7.048.420	7.416.348
Ayam Buras/Kampung	4.705.052	4.843.053	660.701
Itik	120.390	124.747	19.477

Tabel 3
Data Populasi Ternak/Unggas Provinsi Papua Barat
Tahun 2020-2022

Jenis Ternak	Jumlah Ternak		
	2020	2021	2022
Sapi Potong	61.415	66.319	67.242
Kerbau	-	-	-
Kuda	8	7	7
Kambing/domba	18.412	16.846	17.041
Babi	92.089	72.008	69.161
Ayam Ras Petelur	413.610	562.962	572.631
Ayam Ras Pedaging/Potong	895.822	926.642	980.589
Ayam Buras/Kampung	611.191	1.109.019	1.576.679
Itik	94.323	93.271	96.280

Sumber: BPS Papua Barat, data diolah 2024.

Tabel 3
Data Produksi Daging Ternak/Unggas Provinsi Papua Barat
Tahun 2021-2023

Jenis Ternak	Jumlah Produksi Daging (Kg)		
	2021	2022	2023
Sapi Potong	1.762.858	1.044.594	379.591
Kerbau	-	-	-
Kuda	-	-	-
Kambing/domba	59.366	8.298	7.627
Babi	1.596.274	965.784	401.481
Ayam Ras Petelur	412.426	421.122	249.482
Ayam Ras Pedaging	1.021.734	1.155.308	1.301.571
Ayam Buras/Kampung	1.195.522	1.699.659	828.206
Itik	58.630	60.521	54.765

Perkembangan populasi ternak dan produksi daging tersebut harus diimbangi oleh pemerintah dengan menghadirkan peningkatan pelayanan, khususnya pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang selaras dengan salah satu misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mencapai visi

“Terwujudnya Peternakan Indonesia Yang Berdaya Saing dan berkelanjutan Dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju, Mandiri dan Modern”, yakni Mewujudkan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat veteriner.

Hal yang perlu menjadi catatan atau perhatian terkait dengan populasi ternak, bila merujuk data populasi ternak yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2022, populasi salah satu komoditi peternakan yakni populasi babi di Papua merupakan populasi tertinggi kedua secara nasional (sebanyak 993.351 ekor pada Tahun 2022) dibawah Nusa Tenggara Timur yang memiliki populasi babi mencapai 2.132.124 ekor pada tahun 2022 walaupun jumlah populasi Babi pada kedua provinsi tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah populasi pada tahun 2021. Babi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari budaya di seantero wilayah Papua, terutama di daerah dataran tinggi, karena tidak hanya sekedar sebagai sumber pendapatan tatapi juga menjadi “simbol” status kekayaan, kemakmuran material/ekonomi dan kekuasaan, tetapi juga memiliki nilai budaya yang sangat tinggi dipergunakan dalam acara ‘tukar daging babi’ dan dagingnya selalu menjadi menu utama dalam setiap acara pesta jamuan yang diadakan dan merupakan bagian penting dalam ritual adat (pernikahan, penyelesaian sengketa, dan ritual keagamaan). Beternak babi juga merupakan salah satu mata pencarian utama bagi masyarakat pulau papua, khususnya di pedesaan/pedalaman.

Selain ternak babi, ternak besar lain seperti sapi, kerbau, kambing dan domba dipelihara dengan sistem pemeliharaan ekstensif dan semi intensif di kawasan padang penggembalaan, perkebunan kelapa sawit dan kawasan hutan yang cukup luas. Sistem pemeliharaan yang didominasi oleh sistem ekstensif dan semi intensif memang memiliki sisi keuntungan, yaitu biaya operasional pemeliharaan akan menjadi lebih murah, akan tetapi sistem tersebut juga memiliki tantangan tersendiri, yakni peluang menyebarnya penyakit hewan akan lebih mudah dan

cepat apabila penyakit hewan masuk dalam suatu koloni maupun suatu kawasan, juga membuka peluang yang besar untuk terjadinya penularan penyakit *zoonosis*, dan hal ini sudah terbukti dengan tingginya *seroprevalensi sisticerkosis* di beberapa daerah, terutama di daerah pegunungan dimana konsentrasi populasi babi berada. Kondisi ini berkonsekuensi kepada keharusan pemerintah untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan hewan, khususnya laboratorium kesehatan hewan/veteriner yang mumpuni. Pengembangan Loka Veteriner Jayapura menjadi Balai Veteriner diharapkan akan menjawab tantangan tersebut dalam bentuk pelaksanaan surveilans dan monitoring penyakit hewan dan produknya yang komprehensif, yang output kegiatannya dapat dipakai oleh pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan pengendalian penyakit hewan maupun penyakit yang bersifat *zoonosis* sehingga menghadirkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat dalam pengembangan kawasan peternakan.

1.1.4. Kesehatan Hewan

Kesehatan hewan merupakan komponen yang penting pada usaha peternakan dalam menghasilkan produk, disamping juga mempengaruhi pada kesehatan masyarakat di sekitarnya. Pengembangan Balai Veteriner Jayapura secara langsung akan mengembangkan juga penyelenggaraan fungsi unit atau satuan kerja, sehingga akan sangat mendukung penyelenggaraan kesehatan hewan yang dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui pengendalian, pencegahan dan pengobatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan serta kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat *emerging* dan *reemerging diseases* melalui arus perdagangan ternak antar wilayah, antar pulau maupun antar negara.

Menteri Pertanian RI telah menetapkan 18 penyakit menular strategis melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 121/KPTS/PK.320/M/03/2023 tentang Jenis Penetapan Jenis Penyakit Menular Strategis (PHMS), diantaranya yakni:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Anthrax | 12. Hog Cholera/Classical Swine Fever |
| 2. Rabies | 13. Penyakit Mulut dan Kuku |
| 3. Salmonellosis (Unggas) | 14. Lumpy Skin Disease |
| 4. Brucellosis | 15. African Swine Fever (ASF) |
| 5. Avian Influenza | 16. Bovine Viral Diarrhea |
| 6. Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome | 17. Zoonotic Coronavirus |
| 7. Haemorrhagic Septicaemia /Septicaemia Epizootica | 18. Zoonotic Tuberculosis |
| 8. Infectious Bovine Rhinotracheitis/ Infectious Pustular Vulvovaginitis (IBR-IPV) | |
| 9. Leptospirosis | |
| 10. Jembrana | |
| 11. Surra/Trypanosomiasis | |

Hasil pengujian terhadap sampel yang telah dikoleksi menunjukkan ada/tidaknya penyakit hewan menular (PHM) di wilayah Papua dan Papua Barat. Secara garis besar, status penyakit dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- Penyakit hewan menular (PHM) yang tidak ditemukan:
 - Rabies;
 - Anthrax;
 - Surra;
 - Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR);
 - Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE);
 - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK); sedangkan
- Penyakit hewan menular (PHM) yang ditemukan:
 - Avian Influenza (AI), Tahun 2018-2023;
 - Brucellosis, Tahun 2019 dan 2020;
 - Hog Cholera/Classical Swine Fever, Tahun 2018-2022;
 - Helminthiasis/kecacingan, Tahun 2018,2019,2020 dan 2023;
 - Salmonellosis, Tahun 2020-2022
 - African Swine Fever (ASF), Tahun 2024-2025;

Hasil pengujian 5 (lima) tahun terakhir menginformasikan bahwa masih ada penyakit hewan strategis dan sangat terkait dengan tulang punggung subsektor peternakan di Papua dan Papua Barat, yakni *Hog Cholera/Classical Swine Fever* atau kolera babi dan khususnya African Swine Fever (ASF) pada tahun 2024 sampai dengan saat ini, mengingat bahwa di Provinsi Papua dan Papua Barat peternakan babi merupakan salah satu kekuatan ekonomi keluarga. Ternak babi berdampak secara finansial, adat dan sosial. Adanya morbiditas dan mortalitas pada ternak babi berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Munculnya kasus ASF dapat disebabkan oleh tekanan dari sistem peternakan babi tradisional yang semi profesional, tingkat kepadatan peternakan yang tinggi, pengaruh musim, tekanan imunologis dari *multi hospes* (strain babi). Mengingat provinsi di Pulau Papua, khususnya di Provinsi Papua dan DOB pemekarannya merupakan salah satu sentral peternakan babi terbesar di Indonesia untuk itu perlu dilakukan *surveilans* dan monitoring penyakit pada ternak babi secara terstruktur serta kolaboratif dengan pemangku kepentingan lain terkait pengendalian penyakit *zoonosis*.

1.1.5. Status Bebas Penyakit Hewan Menular Strategis

Provinsi Papua dan Papua Barat yang merupakan induk dari DOB terletak di pulau yang terpisah dengan wilayah lain Indonesia serta merupakan pulau terluar dan perbatasan negara selain memiliki nilai strategis bagi Indonesia, tidak terlepas juga dengan potensi ancaman dari luar, tidak terkecuali ancaman penyakit hewan. Dalam hal status kesehatan hewan, Provinsi Papua telah secara resmi mendapatkan pengakuan bebas dari penyakit yang tertuang dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian, yaitu:

- Keputusan Menteri Pertanian RI No. 367/Kpts/PD.640/7/2003 tentang Pernyataan Papua Bebas Dari Penyakit Anthrax;
- Keputusan Menteri Pertanian RI No. 600/Kpts/PK.320/9/2017 tentang Provinsi Papua Bebas Dari Penyakit Avian Influenza pada Unggas;

- Keputusan Menteri Pertanian RI No. 429/KPTS/PK.320/M/7/2019 tentang Provinsi Papua Bebas Dari Penyakit Anjing Gila (Rabies).

Selain telah dinyatakan terbebas dari tiga penyakit diatas, pada saat wilayah lain Indonesia merebak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD), maupun adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit Rabies, dari hasil surveilans klinis dan pengujian laboratoris yang dilaksanakan oleh Balai Veteriner Jayapura berkolaborasi dengan dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan provinsi maupun kabupaten/kota maupun didasarkan dari data laporan Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) sampai Bulan Juli 2023, wilayah Provinsi Papua, Papua Barat dan empat DOB masih dinyatakan terbebas dari penyakit PMK maupun LSD.

Kepmentan yang telah diterbitkan sebagai pengakuan secara resmi akan status bebas penyakit sebagaimana diuraikan diatas, juga memberikan perintah Tindakan atau Langkah yang harus dilaksanakan pasca penetapan status, diantaranya :

- Diktum kedua angka 1 (satu) Keputusan Menteri Pertanian RI No. 367/Kpts/PD.640/7/2003 menyatakan : untuk menjaga dan mempertahankan wilayah Propinsi Papua bebas dari penyakit hewan menular Anthrax perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan penularan baru penyakit hewan menular Anthrax dengan sistem pengamatan yang teratur dan berkesinambungan serta melaksanakan tindak pencegahan dan penolakan secara ketat dan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang karantina hewan.
- Diktum kedua Kepmentan No. 600/Kpts/PK.320/9/2017 menyatakan bahwa Untuk menjaga dan mempertahankan status bebas dari penyakit *Avian Influenza* (AI) pada unggas sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu, perlu dilakukan : (1) peningkatan kewasdaan terhadap kemungkinan penularan baru penyakit *Avian Influenza* (AI) melalui pengamatan yang teratur dan berkesinambungan,

pelaksanaan tindakan pengamanan dan pencegahan, serta pengawasan lalu lintas unggas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan (2) peningkatan kegiatan deteksi dini, pelaporan cepat, dan respon cepat pengendalian di lapangan.

- Diktum ketiga Kepmentan RI No.429/KPTS/PK.320/M/7/2019 menyatakan bahwa untuk mewaspadai resiko penularan Kembali pengakit Rabies perlu dilakukan tindakan: (a) pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan melalui surveilans, penyidikan, pemeriksaan, dan pengujian, peringatan dini, serta pelaporan.

Tindakan atau Langkah yang harus dilakukan pasca penetapan status bebas tersebut mencerminkan betapa lab veteriner sangat berperan penting, serta menggambarkan betapa Langkah-langkah yang akan dilakukan bukan sesuatu yang sederhana, tapi merupakan gerakan besar yang harus dilakukan secara kolaboratif antar para stakeholder/pemangku kepentingan sehingga langkah yang dilakukan dapat efektif.

Kemanfaatan Status bebas penyakit tidak terbatas pada subsektor peternakan saja, akan tetapi bermanfaat juga pada sektor ekonomi yang lain, seperti perdagangan khususnya komoditi pertanian, pariwisata dan sebagainya. Sebagai contoh adalah sektor pariwisata yang merupakan salah satu sektor yang dikembangkan di wilayah Papua dan Papua Barat. Dengan kondisi status bebas penyakit Rabies, wisatawan akan dengan leluasa menikmati keindahan alam yang disajikan oleh Pulau Papua, tanpa kekhawatiran adanya ancaman gigitan hewan penular Rabies (HPR), sehingga daya Tarik Pulau Papua akan terus mengundang para wisatawan berkunjung ke Pulau Papua. Demikian juga dengan status bebas AI maupun PMK dan LSD. Kegiatan jual-beli komoditi pertanian akan dapat dilaksanakan dengan bebas ke daerah maupun negara yang berstatus sama atau ke daerah yang tertular.

Kondisi yang membanggakan tersebut tidak berarti membolehkan para pemangku kepentingan termasuk Kementerian Pertanian

khususnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi terlena, tetapi harus menjadi pemicu semangat untuk secara aktif melakukan aktivitas mempertahankan status tersebut, terlebih dengan semakin meningkatnya lalu lintas hewan dan produknya yang akan meningkatkan risiko masuknya penyakit hewan ke wilayah Indonesia khususnya ke Pulau Papua. Balai Veteriner Jayapura sebagai ujung tombak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Papua dan Papua Barat (serta provinsi/Daerah Otonomi Baru) harus mampu menterjemahkan kebijakan-kebijakan pusat dalam peran mengamankan Pulau Papua dari ancaman penyakit hewan, dalam hal ini dengan melaksanakan surveilans dan monitoring yang didasarkan pada kegiatan lapangan maupun pengujian laboratorik.

1.1.6. Konsumsi Protein Hewani

Protein merupakan salah satu zat gizi atau nutrisi yang sangat diperlukan oleh tubuh, khususnya dalam masa pertumbuhan. Konsumsi protein yang ideal bagi setiap orang yaitu 57 gram protein/hari/orang (Indrati R, Gardjito M. 2013). Kesenjangan konsumsi protein hewani rata-rata masyarakat yang tinggal di Pulau Papua, khususnya Provinsi Papua masih cukup tinggi apabila dibandingkan dengan konsumsi ideal masih terjadi sampai saat ini. Badan Pusat Statistik merilis data konsumsi protein hewani masyarakat Papua dan Papua Barat dan DOB lainnya sebagaimana tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 2
Data Konsumsi Protein Hewani Masyarakat Papua dan Papua Barat Tahun 2018-2021

Provinsi	Tahun					Satuan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Papua Barat	55,16	54,82	55,32	54,62	51,77	Gram
Papua	46,52	44,94	45,07	46,79	54,73	Gram
Papua Barat Daya	-	-	-	-	57,82	Gram
Papua Selatan	-	-	-	-	51,56	Gram
Papua Tengah	-	-	-	-	43,47	Gram
Papua Pegunungan	-	-	-	-	39,89	Gram
Indonesia	61,98	62,27	62,21	62,32	61,69	Gram

Sumber: BPS, data 26 November 2024

Data tersebut berkorelasi dengan masih tingginya angka *stunting* di wilayah pulau Papua, sejalanannya dengan Program Presiden bahwa pemerintah terus bekerja memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat, dapat tumbuh dengan gizi yang cukup, bebas dari *stunting* atau tumbuh kerdil. Kementerian Pertanian sebagai kementerian teknis dalam penyediaan pangan yang diderivasi pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan turut aktif menyokong kebijakan presiden tersebut yang mewujud dalam visi dan misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peran Balai Veteriner Jayapura sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam rangka perbaikan konsumsi protein hewani dan dalam tujuan yang lebih luas menurunkan *stunting* yakni Balai Veteriner Jayapura harus mampu mengimplementasikan visi dan misi Ditjen PKH dalam aktivitas dan operasional, sebagaimana tugas yang telah diamanahkan, yakni Melaksanakan Pengamatan, pengidentifikasian, diagnosea, pengujian veteriner dan produk hewan, serta penyelenggaraan fungsi, khususnya pengujian dan pengawasan terhadap keamanan pangan asal hewan (lingkup kegiatan kesmavet), sehingga diharapkan masyarakat dapat mengkonsumsi protein hewani yang aman dan bernilai gizi yang baik.

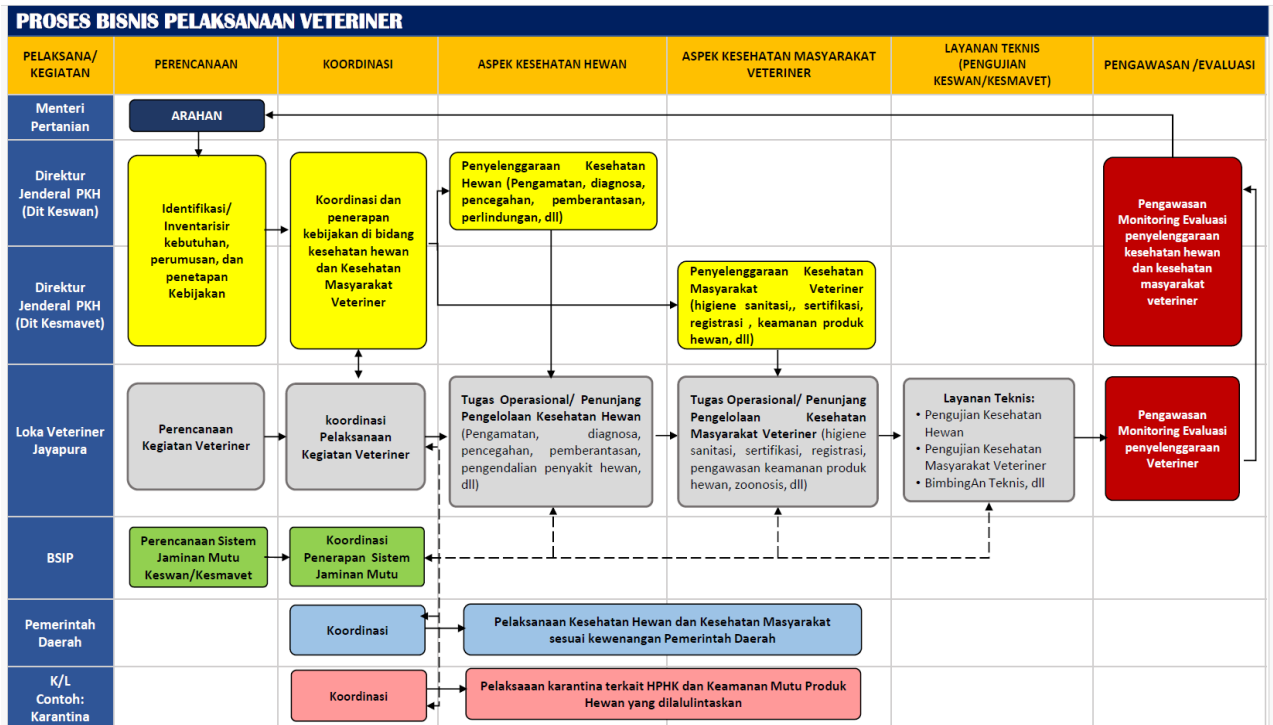
1.2. Tugas dan Fungsi Balai Veteriner Jayapura

Tugas Pokok Balai Veteriner Jayapura dijelaskan dalam Permentan No.12 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yakni: “melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian, diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan”. Dilanjutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Veteriner Jayapura menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian produk hewan, serta pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian;
- d. Pelaksanaan surveilans penyakit hewan dan produk hewan;
- e. Pemeriksaan Kesehatan hewan, semen, embrio dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- f. Penyusunan jenis, status situasi dan peta penyakit hewan wilayah kerjanya;
- g. Pelaksanaan pengujian forensik veteriner;
- h. Pelaksanaan kesadaran masyarakat;
- i. Pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pangan;
- j. Pelaksanaan dan pemberian layanan bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan, penanggulangan penyakit hewan dan kesejahteraan hewan;
- k. Pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner;
- l. Pelaksanaan analisis resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan;
- m. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner;
- n. Pengujian residu obat hewan dan cemaran mikroba;
- o. Pemberian pelayanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk hewan;
- p. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnose, pengujian veteriner dan produk hewan;
- q. Pelaksanaan diseminasi informasi veteriner;
- r. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan penata usahaan barang milik negara Balai Veteriner Jayapura.

Secara grafis proses bisnis pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi Balai Veteriner Jayapura adalah sebagai berikut :

Gambar 1
Proses Bisnis Balai Veteriner Jayapura

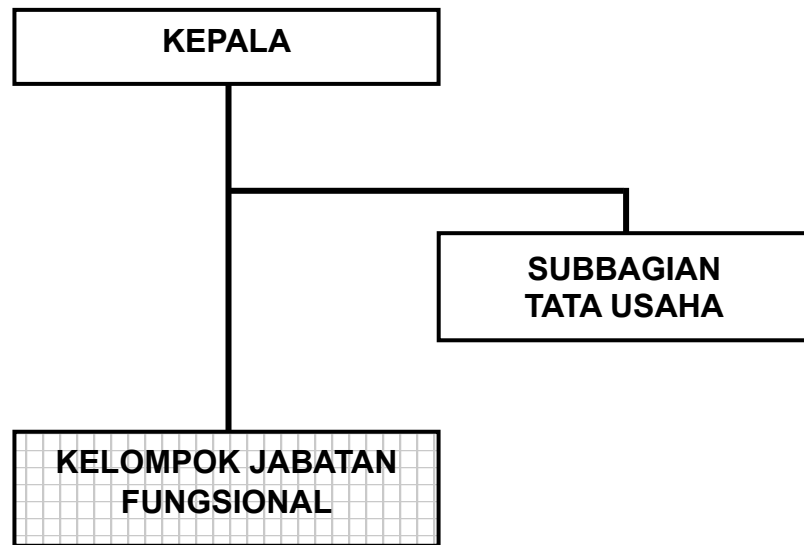


1.3. Struktur Organisasi

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan permentan 7 tahun 2024 menjelaskan bahwa:

- 1) Balai Veteriner Jayapura merupakan UPT yang berada dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 2) Balai Veteriner Jayapura dipimpin oleh seorang Kepala.
- 3) Pembinaan secara teknis oleh Direktur Kesehatan Hewan dan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Struktur organisasi Balai Veteriner Jayapura adalah sebagai berikut:

Gambar 2
Bagan Struktur Organisasi Balai Veteriner Jayapura



1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan fungsi, Balai Veteriner Jayapura saat ini memiliki sumber daya manusia sebagai berikut:

Tabel 4
Data Pegawai Balai Veteriner Jayapura

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Status Kepegawaian
1	Kepala Balai	1	PNS
2	Dokter Hewan/Medik Veteriner	6	4 PNS, 2 THL/PPNPN
3	Paramedik Veteriner	2	2 PNS
4	Tenaga Administrasi	5	3 PNS, 2 THL/ PPNPN
5	Petugas Keamanan/Satpam	4	THL/PPNPN
6	Pramubakti	2	THL/PPNPN
7	Pengemudi	1	THL/PPNPN
Jumlah Personel/SDM		21	

Sumber: Balai Veteriner Jayapura, Data Diolah, 2025

1.5. Dukungan Anggaran

Tahun Anggaran 2024 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan nomor SP DIPA- 018.06.2.618061/2024, Loka Veteriner Jayapura mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 2.823.831.000,00. Anggaran tersebut terdistribusi kedalam beberapa akun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5
Alokasi Anggaran per-Akun T.A 2024

Program	Kode Akun	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
Dukungan Manajemen (WA)	1787	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Rp 2.823.831.000,00
Total			Rp 2.823.831.000,00

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam menerjemahkan visi dan misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam tataran teknis, Kepala Loka Veteriner Jayapura telah menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan janji Kepala Loka Veteriner Jayapura kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Isi dari PK adalah sebagai berikut :

Kinerja Bulanan

1. Pencapaian Target Kinerja Output Kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi Rp 2.823.831.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).
2. Target Penyerapan Anggaran Kumulatif pada bulan : I (1%); II (10%); III (30%); IV (40%); V (50%); VI (60%); VII (70%); VIII (80%); IX (90%); X (95%); XI (98%); dan XII (100%).a
3. Pelaporan Kinerja Output Fisik bulanan dalam penyerapan anggaran.
4. Penyelesaian Kerugian Negara (KN): -

Tabel 6
Kinerja Tahunan

No	Sasaran Kinerja	Indikator	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Loka Veteriner Jayapura yang diberikan	3,00 Skala Likert
2	Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan
		Layanan Manajemen Kinerja Internal	3 Dokumen

Alokasi Kegiatan dan Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Keswan	Rp 2.823.831.000,00,-
Jumlah		Rp 2.823.831.000,00
Terbilang : (Dua Milyah Delapan Ratus Dua Puluh Tigas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)		

Dalam perjalanan waktu Tahun Anggaran 2024, telah terjadi beberapa kali revisi anggaran. Histori revisi anggaran tersebut diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 7
Histori Revisi Anggaran

NO	NO DIPA	PAGU AWAL (Rp)	TANGGAL REVISI	PAGU PASCA REVISI (Rp)
1	SP DIPA-018.06.2.618061/2024	22.570.997.000,00	24 November 2023	-
2	SP DIPA-018.06.2.618061/2024	22.570.997.000,00	07 November 2023	22.570.997.000,00
3	SP DIPA-018.06.2.618061/2024	22.570.997.000,00	05 Januari 2024	2.823.831.000,00
4	SP DIPA-018.06.2.618061/2024	2.823.831.000,00	23 Januari 2024	2.823.831.000,00
5	SP DIPA-018.06.2.618061/2024	2.823.831.000,00	25 Maret 2024	2.823.831.000,00
6	SP DIPA-018.06.2.618061/2024	2.823.831.000,00	14 Mei 2024	2.823.831.000,00
7	SP DIPA-018.06.2.618061/2024	2.823.831.000,00	15 Juli 2024	2.823.831.000,00
8	SP DIPA-018.06.2.618061/2024	2.823.831.000,00	10 Agustus 2024	2.803.831.000,00
9	SP DIPA-018.06.2.618061/2024	2.803.831.000,00	02 September 2024	2.915.314.000,00
10	SP DIPA-018.06.2.618061/2024	2.915.314.000,00	10 Oktober 2024	2.915.314.000,00
11	SP DIPA-018.06.2.618061/2024	2.915.314.000,00	03 Desember 2024	2.915.314.000,00
12	SP DIPA-018.06.2.618061/2024	2.915.314.000,00	11 Desember 2024	2.915.314.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Mengukur akuntabilitas kinerja dapat dimaknai membandingkan realisasi kinerja dengan perjanjian kinerja (PK) yang telah ditandatangani. Pengukuran tersebut terlihat dalam uraian dibawah ini :

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima

a. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Balai Veteriner Jayapura

Dalam mengukur capaian sasaran kinerja tersebut digunakan Indeks kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh Balai Veteriner Jayapura dengan target nilai sebesar 3,7 Skala Likert. Balai Veteriner Jayapura telah melakukan kegiatan survei kepuasan masyarakat (SKM) untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama 2 kali, yakni semester I dan II T.A 2024. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan kuesioner digital (*google form*) yang disebarakan kepada pengguna layanan dengan hasil sebagai berikut:

➤ Semester I

Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Unsur yang diukur dalam kuesioner SKM Balai Veteriner Jayapura yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Pengolahan data berdasarkan hasil pengisian kuisioner secara online oleh 65 orang responden penerima layanan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 8
Detail Nilai SKM Semester I Per Unsur

Jenis	Nilai Unsur Layanan									Rerata
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
IKM per Unsur	3,55	3,50	3,52	3,58	3,62	3,67	3,66	3,50	3,6	3,6
Kategori	A	B	B	A	A	A	A	B	A	A

➤ **Semester II**

Pada pelaksanaan survei IKM semester II digunakan unsur penilaian/pengukuran yang sama dengan semester I terhadap 65 responden dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 9
Detail Nilai SKM Semester II Per Unsur

Jenis	Nilai Unsur Layanan									Rerata
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
IKM per unsur	3,55	3,82	3,7	3,76	3,76	3,67	3,82	3,64	3,82	3,72
Kategori	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Rerata hasil penilaian atau pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) Tahun 2023 adalah 3,68 (Pembulatan 3,7). Apabila dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja (PK) yakni 3,7 , maka capaian sasaran kinerja Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima mencapai target atau 100%, sehingga capaian kinerja Balai Veteriner Jayapura masuk dalam predikat/kategori **berhasil**.

b. Nilai Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan salah satu upaya strategis dalam reformasi birokrasi guna

menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan fokus melayani. Evaluasi Mandiri ZI dilakukan sebagai langkah awal untuk menilai kesiapan unit kerja dalam menghadapi penilaian eksternal serta memastikan implementasi program berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Evaluasi Mandiri Zona Integritas Balai Veteriner Jayapura dilaksanakan oleh Tim Evaluator ZI Mandiri Unit Pelaksana Teknis Ditjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024. Evaluasi dilakukan terhadap 6 (enam) area perubahan yang menjadi indikator utama dalam pembangunan ZI yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Hasil Penilaian ZI Balai Veteriner Jayapura dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian ZI Mandiri yang ditandatangani oleh Koordinator Tim Evaluator Zi dan Kepala Balai Veteriner Jayapura dengan hasil penilaian yang disepakati sebagai berikut:

No	Nilai				Ket.
	Pengungkit	Pelayanan Publik Yang Prima	Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Total	
1	51,62 (86,04%)	15,93 (91.00%)	18,43 (81,89%)	85,97	OK

Hasil penilaian mandiri ZI Balai Veteriner Jayapura jika dibandingkan dengan target nilai pembangunan ZI pada perjanjian kinerja (PK) yakni Nilai 80 , maka capaian indikator Nilai Pembangunan ZI pada sasaran kinerja Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima mencapai target atau 100%, sehingga capaian kinerja Balai Veteriner Jayapura masuk dalam predikat/kategori **berhasil**.

3.1.2. Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen

Sasaran kinerja Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen memiliki 6 (enam) indikator kinerja, yaitu :

- | | |
|--|-----------|
| a. Layanan Barang Milik Negara (BMN) | 1 Layanan |
| b. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | 1 Layanan |
| c. Layanan Perkantoran | 2 Layanan |
| d. Layanan Perencanaan & Penganggaran | 7 Dokumen |
| e. Layanan Pemantauan dan Evaluasi | 1 Dokumen |
| f. Layanan Manajemen Keuangan | 4 Dokumen |

Realisasi sasaran kinerja untuk seluruh indikator kinerja di atas telah terpenuhi, khususnya untuk dokumen perencanaan, laporan keuangan dan laporan BMN, telah diajukan ke tim verifikator yang beranggotakan verifikator dari eselon I Ditjen. Peternakan dan kesehatan Hewan dan Inspektorat Jenderal untuk dilakukan diverifikasi dan review, sehingga dengan demikian maka capaian kinerja adalah 100% atau masuk kategori/predikat **berhasil**.

3.1.3. Kegiatan Teknis Dalam Rangka Mendukung Kinerja Organisasi

A. Peningkatan Layanan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Dalam sasaran kinerja ini terdapat dua indikator, yakni Pengendalian dan Identifikasi Penyakit Hewan dengan target 4.740 sampel dan Sarana bidang Kesehatan Hewan dengan target 1 unit. Realisasi kegiatan pengendalian dan identifikasi penyakit hewan dengan fokus kegiatan pengambilan/koleksi dan pengujian sampel adalah :

Tabel 10
Realisasi Pengujian Pengendalian dan Identifikasi Penyakit Hewan

No	Jenis Penyakit	Jenis Sampel	Jumlah Sampel	Jenis Pengujian
1.	African Swine Fever (ASF)	Serum	7	Elisa Ab
		Darah, Organ, Daging, Swab	221	PCR
2.	Avian Influenza (AI)	Serum	16	HA-HI Test AI H5 clade 2.1.3
		Serum	16	HA-HI Test AI H5 clade 2.3.2

		Serum	4	HA-HI Test AI H9
		Swab	5	PCR
3.	Anthrax (<i>Bacillus anthracis</i>)	Ulas Darah	16	Polychrome Methylene Blue (PCMB)
4.	Brucellosis oleh <i>B abortus</i>	Serum	81	Rose Bengal Test (RBT)
5.	Classical Swine Fever (CSF)	Serum	33	Elisa Ab
		Darah, Organ, Daging, Swab	52	PCR
6.	Parasit gastrointestinal (kecacingan)	Feses	1.837	Apung
		Feses	1.397	Sedimentasi
		Feses	1.426	Mc Master
7.	Parasit Darah	Ulas Darah	32	Giemsa
8.	Ektoparasit	Ektoparasit	5	Natif
9.	Lumpy Skin Disease (LSD)	Serum	3	Elisa Ab
10.	Newcastle Disease	Serum	5	HA-HI ND
		Isolat virus	7	PCR
11.	Septicemia Epizootica (SE)	Serum	5	Elisa Ab
12.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)	Serum	39	ELISA NSP
		Swab	19	PCR
13.	Pullorum	Serum	45	Rapid Agglutination Test
Jumlah Total			5.271	

Tabel 10 menunjukkan capaian realisasi mencapai 5.271% (>100%) jika tolok ukur yang digunakan adalah perjanjian kinerja yakni ditargetkan 100 sampel. Capaian kinerja kegiatan pengendalian dan identifikasi penyakit Balai Veteriner Jayapura masuk dalam predikat/kategori sangat berhasil, dimana capaian kinerja melebihi 100%. Realisasi sarana bidang kesehatan hewan

B. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Indikator sasaran kinerja Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Keamanan dan Mutu Produk Hewan dengan target 20 Produk. Kegiatan teknis untuk melaksanakan sasaran kinerja adalah dengan melakukan pengawasan keamanan produk asal hewan pada unit-unit usaha yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) atau yang sedang menjalankan proses untuk mendapatkan NKV. Hal tersebut dilaksanakan mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan maksud bahwa hasil

pengujian dari pengawasan keamanan produk dapat digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi dan pembinaan terhadap unit-unit usaha dimaksud. Realisasi Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 12
Realisasi Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

No	Jenis Produk	Jumlah Produk	Jumlah Sampel	Jenis Uji
1	Daging, Telur	73	17	Enumerasi <i>Total Plate Count</i> (TPC)
			38	Enumerasi <i>E.coli</i>
			27	Enumerasi <i>Coliform</i> ,
			16	Enumerasi <i>Enterobacteriaceae</i>
			19	Enumerasi <i>Staphylococcus aureus</i>
			59	Isolasi & identifikasi <i>Salmonella spp.</i>
			32	Formalin
Jumlah Total		73	258	

Jumlah capaian kegiatan atau sasaran kinerja Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diraih dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar 73 produk dan telah dilakukan jenis uji yang berbeda. Capaian yang diperoleh melebihi target yang ditetapkan yakni 20 produk. Dengan demikian persentase capaian kinerja yang mampu diraih sebesar 365% dan termasuk dalam predikat/kategori **sangat berhasil**.

C. Perbandingan Kinerja Teknis Dengan Tahun Anggaran Sebelumnya

Tahun Anggaran sebelum 2023, yakni 2022, penganggaran Balai Veteriner Jayapura masih tergabung dan menjadi bagian dari penganggaran Balai Besar Veteriner Jayapura, sehingga sasaran utama yang memungkinkan untuk diperbandingkan adalah realisasi sampel pengujian, baik dalam kegiatan pengendalian dan identifikasi penyakit maupun Keamanan dan Mutu Produk Hewan. Perbandingannya sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Pengujian Pengendalian dan Identifikasi Penyakit Hewan Peningkatan serta Peningkatan Keamanan dan Mutu Produk Hewan

No	Tahun Anggaran	Pengendalian dan Identifikasi Penyakit Hewan			Keamanan dan Mutu Produk Hewan		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2023	14.040	19.490	138,82	200	258	129
2	2023	100	5271	5271	20	73	365

Tabel di atas memberikan informasi bahwa capaian pengujian Balai Veteriner Jayapura selama Tahun Anggaran (T.A) 2023 dan 2024 selalu di atas target. Dalam kegiatan Pengendalian dan Identifikasi Penyakit Hewan keamanan dan mutu produk hewan terdapat target dan realisasi yang menurun dibandingkan T.A 2023 walaupun persentase capaian hasilnya tetap lebih dari 100%. Penurunan terjadi karena anggaran Balai Veteriner Jayapura pada tahun 2024 mengalami beberapa kali revisi sehingga revisi terakhir menyisakan 1 (satu) akun anggaran terkait layanan dukungan manajemen internal. Akan tetapi secara umum, realisasi sasaran kinerja dua kegiatan di dua tahun anggaran tersebut selalu dalam kategori/predikat **sangat berhasil**.

3.1.4. Analisis keberhasilan

Balai Veteriner Jayapura yang pada Tahun Anggaran 2024 masih sangat minim jumlah sumber daya manusia tapi dengan optimalisasi kerja serta kerjasama yang sangat baik, teruma dengan pihak eksternal yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan baik intansi lain, dinas tingkat kabupaten/kota maupun provinsi maka semua sasaran kinerja dapat terealisasi dengan predikat berhasil ataupun sangat berhasil.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Balai Veteriner Jayapura Tahun Anggaran 2023 per-akun kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 15
Realisasi Anggaran T.A 2024

No.	Rincian Output	Pagu	Realisasi	%
1	WA-1787-EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp 2.915.314.000,00	Rp 2.789.130.315,00	95,67
	Jumlah	Rp 2.915.314.000,00	Rp 2.789.130.315,00	95,67

Catatan:

Realisasi Balai Veteriner Jayapura harusnya mencapai 99,97%, namun terdapat akun blokir *) sebesar Rp 125.338.000,00, sehingga realisasi saat ini adalah 95,67

Tabel tersebut menginformasikan bahwa realisasi anggaran total Balai Veteriner Jayapura sebesar Rp 2.789.130.315,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 2.915.314.000,00 atau sebesar 95,67%. Realisasi tersebut merupakan capaian yang sangat baik, terlebih Balai Veteriner Jayapura merupakan satuan kerja baru, yang baru pertama melaksanakan pengelolaan anggaran secara mandiri dan adanya dinamika penganggaran yang cukup kencang, yakni terjadi 11 (sebelas) kali revisi anggaran dalam bentuk revisi DIPA.

Realisasi anggaran yang telah dicapai tidak cukup semata-mata atau sebatas dilihat prosentase capaiannya saja, tetapi lebih dalam dapat ditelisik efisiensi penggunaan anggaran. Apabila berpegang pada Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021, tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, maka efisiensi penggunaan anggaran Balai Veteriner Jayapura dapat dihitung dengan rumus efisiensi per-Rincian Output (RO) :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

E_{RO} : Efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: Alokasi anggaran RO_i

$RARO_i$: Realisasi anggaran RO_i

CRO_i : Capaian RO_i

Sedangkan perhitungan Nilai Efisiensi mengacu rumus :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan :

NE : Nilai efisiensi

E : Efisiensi

Tabel 16
Hasil Perhitungan Efisiensi

No.	Klasifikasi Rincian Output	Capaian RO	Pagu	Realisasi	Efisiensi RO	Nilai Efisiensi
1	WA-1787-EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	100	Rp 2.915.314.000,00	Rp 2.789.130.315,00	0,04	60,82%
		100	Rp 2.915.314.000,00	Rp 2.789.130.315,00		

Catatan:

Realisasi Balai Veteriner Jayapura harusnya mencapai 99,97%, namun terdapat akun blokir *) sebesar Rp 125.338.000,00, sehingga realisasi saat ini adalah 95,67.

Mengacu pasal 38 Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021, maka nilai efisiensi yang dapat dicapai Balai Veteriner Jayapura pada pemanfaatan anggaran T.A 2024 termasuk dalam kategori/predikat **Cukup**.

BAB IV

PENUTUP

Balai Veteriner Jayapura telah menyelesaikan pelaksanaan kegiatan dengan rambu-rambu Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Loka Veteriner Jayapura dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan realisasi capaian dari 2 (dua) sasaran kerja, dua-duanya masuk dalam kategori/predikat **berhasil**, yakni Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima dan Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen masuk kategori/predikat **berhasil**. Serapan anggaran mencapai 95,67% (Rp 2.789.130.315,00 dari pagu anggaran Rp 2.915.314.000,00) dengan angka efisiensi sebesar 60,82 (kategori Cukup).

LAMPIRAN

1. Dokumen Perjanjian Kinerja
2. Dokumen Perencanaan
3. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
4. Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara
5. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Juwianto

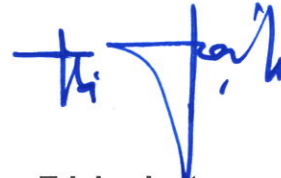
Jabatan : Kepala Loka Veteriner Jayapura

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, September 2024

Kepala Loka,



Tri Juwianto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Juwianto

Jabatan : Kepala Loka Veteriner Jayapura

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Agung Suganda

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

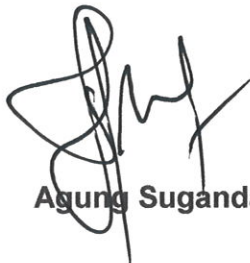
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

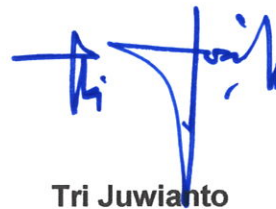
Jakarta, September 2024

Pihak Kedua,



Agung Suganda

Pihak Pertama,



Tri Juwianto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA LOKA VETERINER JAYAPURA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. Kinerja Bulanan

1. Pencapaian Target Kinerja Output Kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi Rp **2.823.831.000,-** (Dua miliar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
2. Target Penyerapan Anggaran kumulatif pada bulan: I (1%); II (10%); III (30%); IV (40%); V (50%); VI (60%); VII (70%); VIII (80%); IX (90%); X (95%); XI (98%); dan XII (100%);
3. Pelaporan Kinerja Output Fisik bulanan dalam penyerapan anggaran;
4. Penyelesaian Kerugian Negara (KN);

II. Kinerja Tahunan

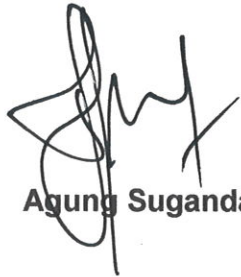
NO	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
1.	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Loka Veteriner Papua yang diberikan	3,075 Skala Likert
		Nilai Pembangunan Zona Integrasi (ZI) Loka Veteriner Jayapura	80 Nilai
2	Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen	Layanan BMN	1 Layanan
		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	2 Layanan
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7 Dokumen
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
		Layanan Manajemen Keuangan	4 Dokumen

III. Alokasi Kegiatan dan Anggaran

Kegiatan		Anggaran
1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Rp	2.823.831.000,-
Jumlah	Rp.	2.823.831.000,-
Terbilang : Dua miliar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah		

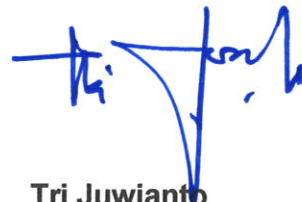
Jakarta, September 2024

Pihak Kedua,



Agung Suganda

Pihak Pertama,



Tri Juwianto



kementan
Kementerian Pertanian
Republik Indonesia

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER I TAHUN 2024

LOKA VETERINER JAYAPURA



@Loka_Veteriner_Jayapura



@Loka veteriner Jayapura



Loka veteriner Jayapura

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Dasar Hukum Pelaksanaan	7
C. Maksud dan Tujuan	7
BAB II PENGUMPULAN DATA SKM.....	9
A. Definisi Survei	9
B. Metode Pengumpulan Data	9
C. Lokasi Pengumpulan Data.....	11
D. Waktu Pelaksanaan SKM	11
E. Penentuan Jumlah Responden	11
BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA	13
A. Jumlah Responden SKM	13
B. Nilai IKM Per Unsur Layanan	15
BAB IV ANALISIS HASIL SKM	19
A. Analisis Masalah/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	19
B. Rencana Tindak Lanjut.....	20
BAB V PENUTUP	21
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan SKM	11
Tabel 2. Data Responden Pengisian Kuisisioner SKM.....	13
Tabel 3. Detail Nilai SKM Per Unsur.....	15
Tabel 4. Rencana Tindak Lanjut	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Tabel Krejcie and Morgan	12
Gambar 2. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	13
Gambar 3. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	14
Gambar 4. Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	14
Gambar 5. Jumlah Responden Berdasarkan Usia	14
Gambar 6. Grafik Nilai SKM Per Unsur	15
Gambar 7. Jumlah Responden Terkait Kesesuaian Persyaratan Pelayanan ...	16
Gambar 8. Jumlah Responden Terkait Kemudahan Prosedur Pelayanan	16
Gambar 9. Jumlah Responden Terkait Kecepatan Waktu Pelayanan	16
Gambar 10. Jumlah Responden Terkait Tarif.....	17
Gambar 11. Jumlah Responden Terkait Kesesuaian Produk Pelayanan	17
Gambar 12. Jumlah Responden Terkait Kompetensi Petugas.....	17
Gambar 13. Jumlah Responden Terkait Perilaku Petugas.....	18
Gambar 14. Jumlah Responden Terkait Kualitas Sarana Prasarana	18
Gambar 15. Jumlah Responden Terkait Penanganan Pengaduan	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamalkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi Loka Veteriner Jayapura sebagai penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Loka Veteriner Jayapura sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Loka Veteriner Jayapura memiliki tugas untuk melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian,

diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Loka Veteriner Jayapura menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian produk hewan, serta pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian;
- d. Pelaksanaan surveilans penyakit hewan, dan produk hewan;
- e. Pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- f. Penyusunan jenis, status situasi dan peta penyakit hewan wilayah kerjanya;
- g. Pelaksanaan pengujian forensik veteriner;
- h. Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat;
- i. Pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan;
- j. Pelaksanaan dan pemberian layanan bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan, penanggulangan penyakit hewan, dan kesejahteraan hewan;
- k. Pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner;
- l. Pelaksanaan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan;
- m. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- n. Pengujian residu obat hewan dan cemaran mikroba;
- o. Pemberian pelayanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk hewan;
- p. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan;
- q. Pelaksanaan diseminasi informasi veteriner;
- r. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara Loka Veteriner Jayapura.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan di Loka Veteriner Jayapura sebagai salah satu penyedia layanan publik di wilayah kerja yang mencakup Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik yang berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017. Hasil SKM didapat dengan merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat dan dielaborasi dengan metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat sehingga didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei kepuasan masyarakat ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik dalam hal ini Loka Veteriner Jayapura untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

C. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan pengamatan dan pengidentifikasian, diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan yang telah diberikan oleh Loka Veteriner Jayapura.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

A. Definisi Survei

Survei merupakan teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data; penyelidikan; peninjauan dapat juga dikatakan sebagai suatu pencarian data untuk menemukan suatu nilai dengan batasan-batasan tertentu terkait sehingga dapat dikatakan Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Pada dasarnya pedoman pelaksanaan survei kepuasan masyarakat sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik

B. Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner digital (google form) yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuisisioner SKM Loka Veteriner Jayapura yaitu:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/ Tarif

Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas yang ditunjukkan dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

C. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di wilayah pelayanan Loka Veteriner Jayapura dan pengumpulan data dilakukan secara online melalui media google form pada tautan <https://s.id/SurveyKepuasanMasyarakatLokavet> Rentang waktu pengisian survei dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2024 sd 26 Juni 2024. Pengisian kuisisioner dilakukan mandiri oleh responden yang pernah dan menerima layanan pada periode semester 1 tahun 2024.

D. Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara berkala dengan jangka waktu selama 1 (satu) dan dibagi dalam dua periodik semester 1 dan Semester II, untuk Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Semester 1 memerlukan waktu kurang lebih 3 pekan atau 16 hari kerja dengan rincian sebagai berikut

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1	Persiapan	10 s.d 14 Juni	5 Hari Kerja
2	Pengumpulan Data/Pengisian Kuisisioner	17 s.d 26 Juni	8 Hari Kerja
3	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	26 Juni	1 Hari Kerja
4	Penyusunan dan Pelaporan	26 sd. 27Juni	2 Hari Kerja

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan SKM

E. Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah penerima layanan dari seluruh jenis pelayanan pada Loka veteriner Jayapura berdasarkan periode survei sebelumnya. Total penerima layanan pada Loka Veteriner Jayapura dalam kurun waktu semester I adalah sebanyak 65 orang/responden/pemohon, dengan jumlah responden dipilih dari

setiap jenis layanan yang dimiliki Loka Veteriner Jayapura. Jumlah responden dihitung menggunakan tabel sampel dari *Krejcie and Morgan*. Berdasarkan Tabel *Krejcie and Morgan*, jumlah minimum sampel responden SKM adalah 56 responden.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

Gambar 1. Tabel *Krejcie and Morgan*

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

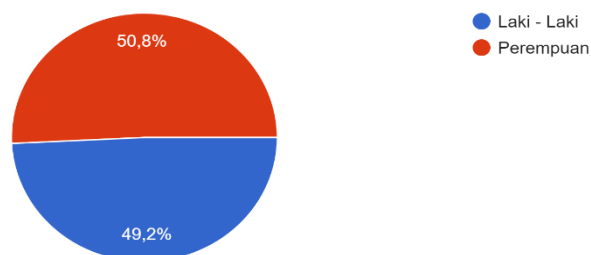
A. Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh dan melakukan pengisian kuisisioner yaitu sebanyak 65 (enam puluh lima) orang responden selama waktu pengisian 17 s.d 26 Juni dengan rincian dalam tabel dan diagram per unsur sebagai berikut :

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERCENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki Laki	33	50,8%
		Perempuan	32	49,2%
2	Pendidikan	SD Ke Bawah	0	0%
		SLTP	1	1,6%
		SMA/SMK	9	13,8%
		Diploma	9	13,8%
		Strata 1	33	52,3%
		Strata 2	12	18,5%
3	Pekerjaan	PNS/TNI/Polri	37	56,9%
		Pegawai/Karyawan Swasta	10	15,4%
		Wiraswasta/Usahawan	10	15,4%
		Pelajar/Mahasiswa	3	4,6%
		Lainnya	5	7,5%
4	Usia	Di bawah 20 Tahun	3	4,6%
		20 - 30 Tahun	13	20%
		31 - 40 Tahun	24	36,9%
		41 - 50 Tahun	16	24,6%
		Di atas 50 Tahun	9	13,8%

Tabel 2. Data Responden Pengisian Kuisisioner SKM

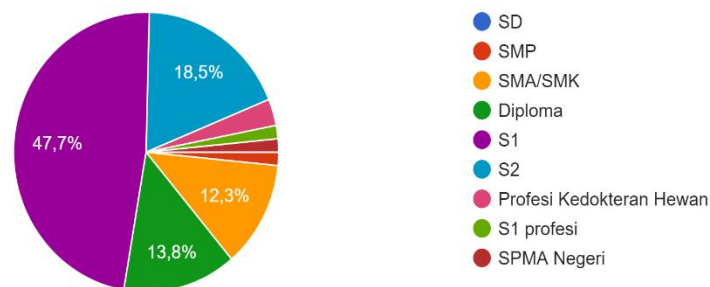
Jenis Kelamin
65 jawaban



Gambar 2. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pendidikan Terakhir

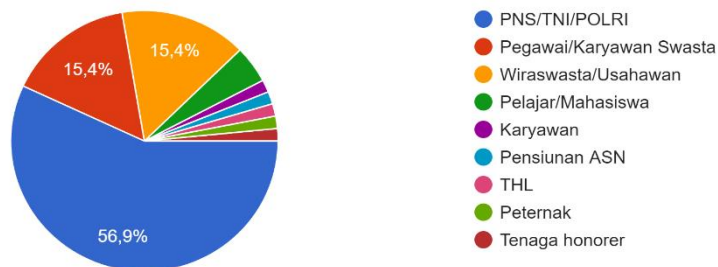
65 jawaban



Gambar 3. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pekerjaan

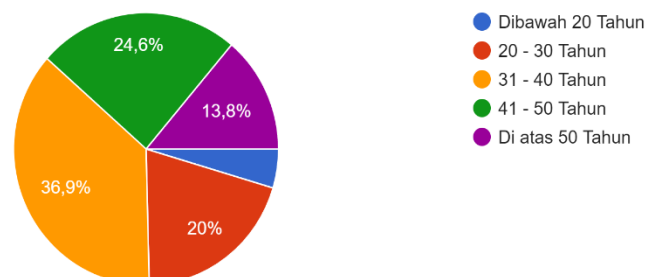
65 jawaban



Gambar 4. Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan

Usia

65 jawaban



Gambar 5. Jumlah Responden Berdasarkan Usia

B. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

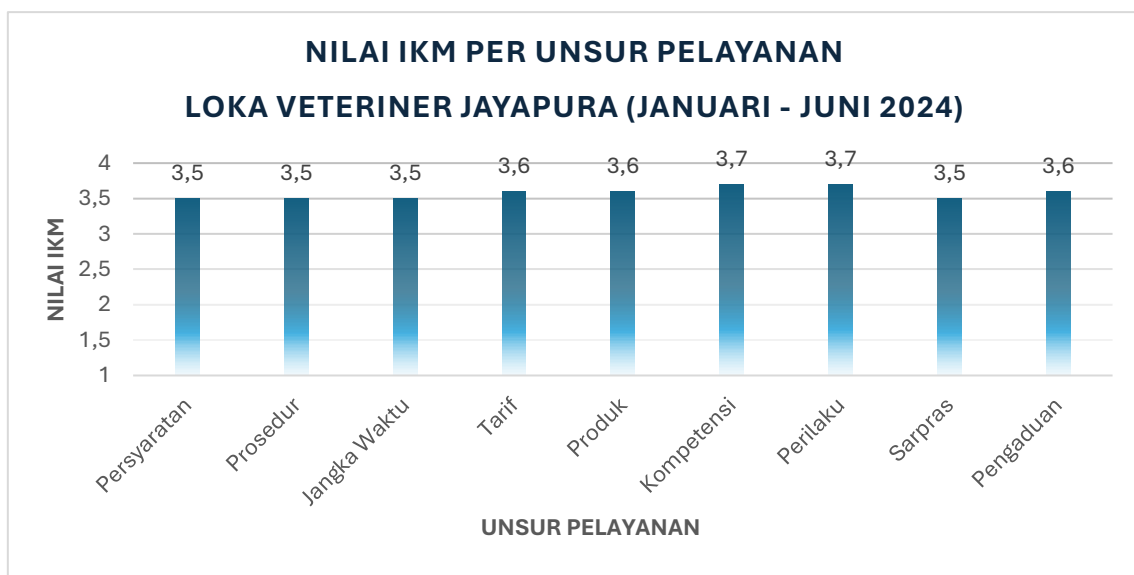
Pengolahan data SKM menggunakan aplikasi pengolah data Microsoft Excel diperoleh hasil sebagai berikut :

NILAI UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	3,553	3,507	3,523	3,584	3,615	3,676	3,661	3,507	3,6
Kategori	A	B	B	A	A	A	A	B	A
IKM Unit Layanan	89,52 (Nilai A atau Sangat Baik)								

Tabel 3. Detail Nilai SKM Per Unsur

Keterangan:

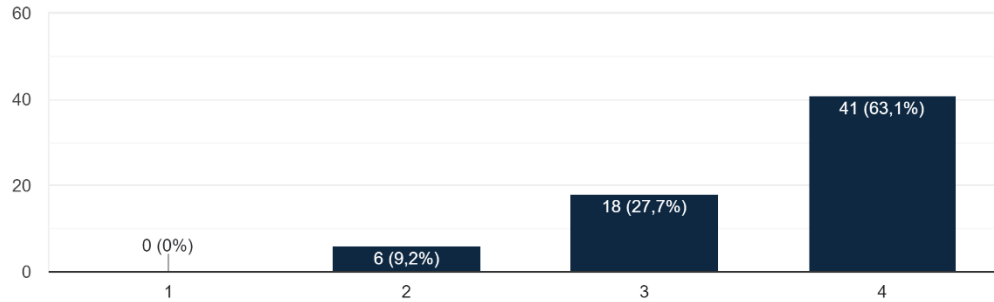
U1 = persyaratan; U2 = sistem, mekanisme dan prosedur; U3 = waktu penyelesaian; U4 = biaya/ tarif; U5 = produk spesifikasi jenis pelayanan; U6 = kompetensi pelaksana; U7 = perilaku pelaksana; U8 = sarana dan prasarana; U9 = penanganan pengaduan, saran dan masukan.



Gambar 6. Grafik Nilai SKM Per Unsur

U1. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan pada Loka Veteriner Jayapura?

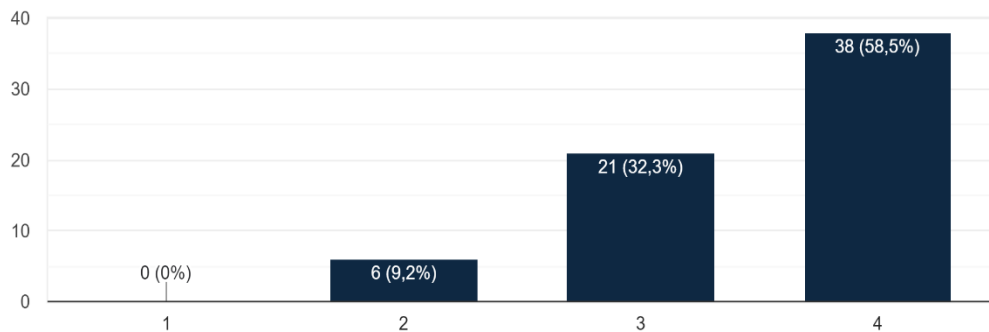
65 jawaban



Gambar 7. Grafik Jumlah Responden Terkait Kesesuaian Persyaratan Pelayanan

U2. Bagaimana pendapat saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?

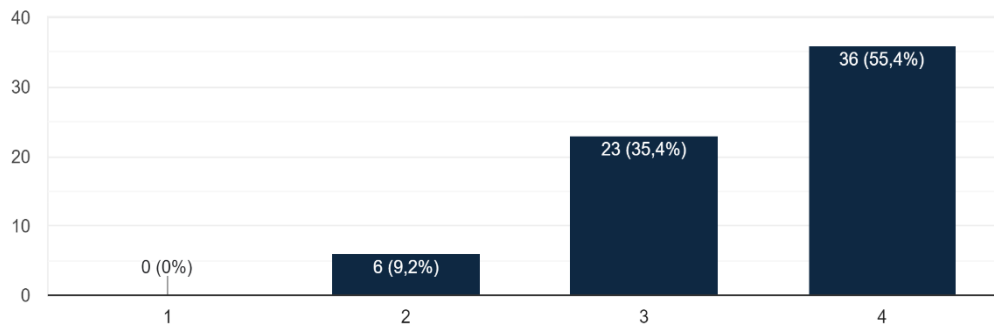
65 jawaban



Gambar 8. Grafik Jumlah Responden Terkait Kemudahan Prosedur Pelayanan

U3. Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?

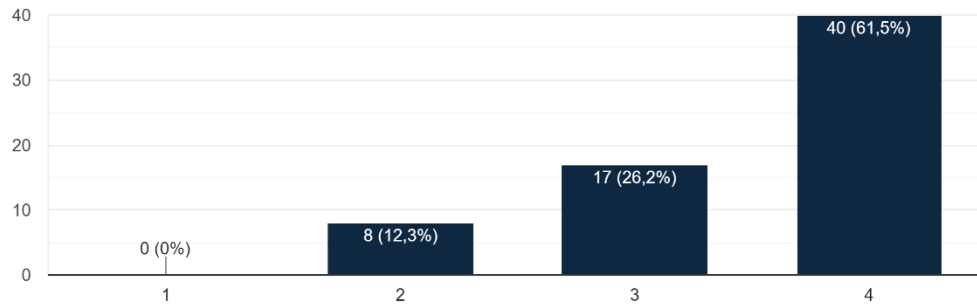
65 jawaban



Gambar 9. Grafik Jumlah Responden Terkait Kecepatan Waktu Pelayanan

U4. Apakah tarif yang ditarik oleh Loka Veteriner Jayapura sesuai dengan peraturan yang berlaku?

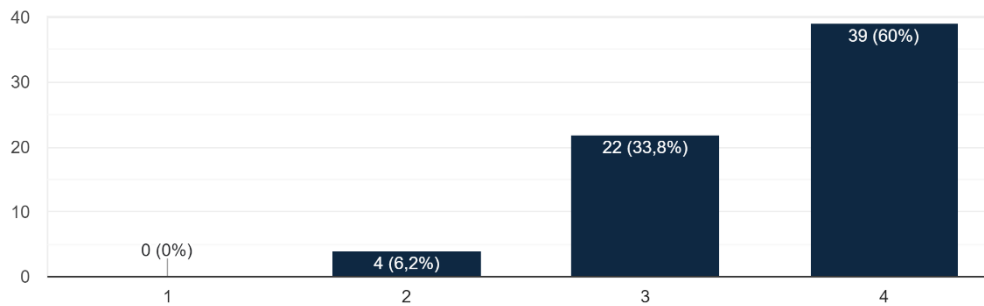
65 jawaban



Gambar 10. Grafik Jumlah Responden Terkait Tarif

U5. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?

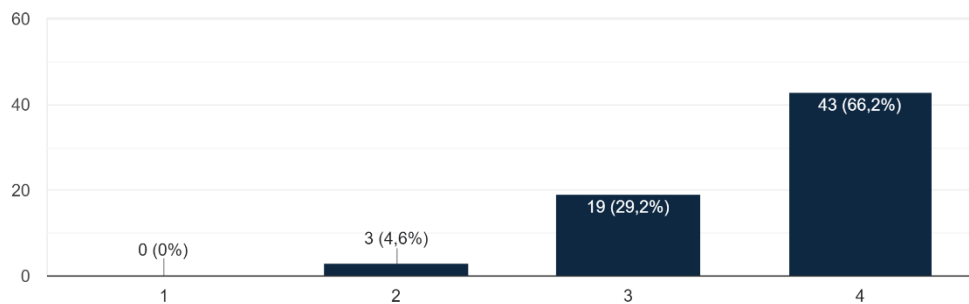
65 jawaban



Gambar 11. Grafik Jumlah Responden Terkait Kesesuaian Produk Pelayanan

U6. Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?

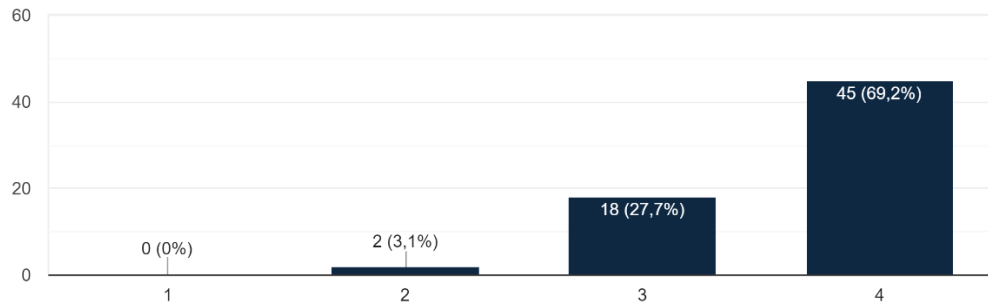
65 jawaban



Gambar 12. Grafik Jumlah Responden Terkait Kompetensi Petugas

U7. Bagaimana pendapat saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?

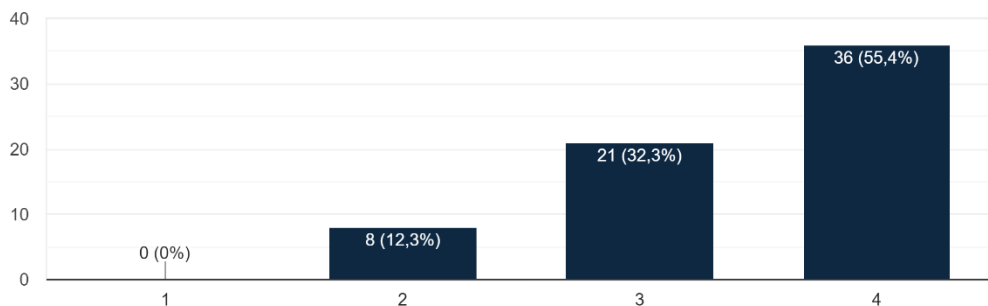
65 jawaban



Gambar 13. Grafik Jumlah Responden Terkait Perilaku Petugas

U8. Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana?

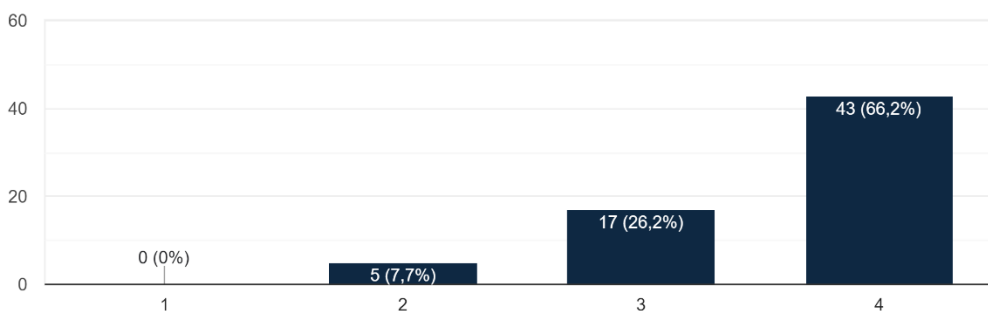
65 jawaban



Gambar 14. Grafik Jumlah Responden Terkait Kualitas Sarana Prasarana

U9. Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan ? 1 : Tidak ada 2 : Ada, tetapi tidak berfungsi 3 : Berfungsi kurang maksimal 4 : Dikelola dengan baik

65 jawaban



Gambar 15. Grafik Jumlah Responden Terkait Penanganan Pengaduan

BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

A. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, dan Sarana Prasarana mendapatkan nilai Baik (berada pada skala 3,5)
2. Sedangkan 6 Unsur lainnya (persyaratan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, dan penanganan pengaduan, saran dan masukan) mendapatkan nilai Sangat Baik dengan nilai tertinggi pertama adalah pada unsur Kompetensi Pelaksana, disusul dengan Unsur Perilaku Pelaksana pada nilai tertinggi kedua, dan Jenis Pelayanan sebagai nilai tertinggi ketiga.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Proporsi jumlah pegawai teknis/pelaksana teknis yang tersedia pada Loka Veteriner Jayapura sangat ramping, sehingga mengakibatkan beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan layanan terkadang beririsan dengan beberapa tugas lainnya di luar dari tugas layanan. (Undangan Kegiatan, Rapat Daring/Luring, dll)
2. Merujuk unsur lainnya yaitu sarana dan prasarana, pada tahun 2024 ketersediaan anggaran pada Loka Veteriner Jayapura sebagai dampak dari *recofusing* anggaran kementerian untuk mendukung proyek strategis kementerian pertanian turut berdampak terhadap penyediaan sarana prasarana habis pakai pada layanan laboratorium Loka Veteriner Jayapura.
3. Kesesuaian biaya/tarif dengan peraturan yang berlaku dalam pelayanan mendapatkan nilai terendah meskipun masih dalam kategori baik. Loka Veteriner Jayapura belum melakukan pungutan biaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016

terhadap layanan yang diberikan kepada penerima karena pelayanan yang diberikan berupa pelayanan aktif.

B. Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya yaitu kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan, dan kualitas sarana dan prasarana.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan secara internal pada tahun berjalan. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

NO	PRIORITAS UNSUR	RENCANA AKSI (PROGRAM/KEGIATAN)	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB
			Jangka Pendek (Tahun Berjalan)		Jangka Menengah (12 s.d 24 Bulan)	Jangka Panjang (> 24 Bulan)	
			SMT I	SMTII			
1.	Kemudahan Prosedur Layanan	Pembaharuan Prosedur Layanan khususnya untuk layanan utama pengujian		v	v	v	Ketua Tim Kerja dan PJ. Info vet
		Peningkatan akses dan informasi terhadap prosedur layanan		v	v	v	Ketua Tim Kerja dan PJ. Infovet
2.	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	Usulan Kebutuhan ASN untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis	v		v	v	Kepala, Ketua Tim Kerja Yantek dan Ketatausahaan
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga teknis eksisting		v	v	v	Ketua Tim Kerja Yantek dan Ketatausahaan
3	kualitas sarana dan prasarana.	Penyediaan sarana prasarana habis pakai		v	v	v	Ketua Tim Kerja, PJ. Pengadaan

Tabel 4. Rencana Tindak Lanjut

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Loka veteriner Jayapura selama satu semester (Januari-Juni) dalam periode 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik pada Loka Veteriner Jayapura , secara umum mencerminkan tingkat kualitas dengan nilai A (Sangat Baik) dengan nilai SKM 89,28. Meskipun demikian, nilai SKM Loka Veteriner Jayapura menunjukkan sedikit penurunan dengan selisih yang tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan penilaian SKM pada Semester I Tahun 2023 yang mendapatkan nilai 89,84 hal ini disebabkan dari awal sampai dengan pertengahan tahun 2024 belum banyak kegiatan *Surveillance* yang dilaksanakan dikarenakan kondisi anggaran Unit kerja yang mengalami *refocusing*. Namun konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tetap konsisten dengan predikat Sangat Baik.
2. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur dengan nilai Baik dan menjadi prioritas peningkatan yaitu Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, dan Sarana Prasarana.
3. Sedangkan 6 unsur layanan lainnya dengan nilai A (sangat Baik) akan terus dipertahankan melalui evaluasi secara berkala dan peningkatan layanan secara konsisten.
4. Pimpinan beserta seluruh pegawai Loka Veteriner Jayapura berkomitmen untuk menjalankan rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan dan mempertahankan kinerja yang telah dicapai atas hasil survei IKM serta mengoptimalkan pelayanan Loka Veteriner Jayapura kepada masyarakat dan seluruh mitra kerja.

Jayapura, 27 Juni 2024

Kepala Loka Veteriner Jayapura



drh. Tri Juwianto

NIP. 197801202009011010

LAMPIRAN DOKUMEN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT **LOKA VETERINER JAYAPURA**



@Loka_Veteriner_Jayapura



@Loka veteriner Jayapura



Loka veteriner Jayapura

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



kementan
Kementerian Pertanian
Republik Indonesia

DOKUMENTASI

Rapat Pembahasan Rencana Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Semester I TA 2024, dan pembagian tugas dan tanggung jawab tiap PJ. untuk menyampaikan Form Survei Kepuasan Masyarakat kepada Responden sesuai wilayah kerjanya.



Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat Loka Veteriner Jayapura

Kepada Yth :

Bapak/Ibu Pengguna Layanan Loka Veteriner Jayapura

Salam sejahtera bagi Bapak/Ibu sekalian,

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan untuk menilai persepsi masyarakat dan mitra kerja

terhadap pelaksanaan layanan Loka Veteriner Jayapura

Bapak/Ibu terpilih sebagai salah satu responden dari survei ini. Untuk itu, kami mohon kesediaannya untuk berpartisipasi dalam pengisian kuesioner ini.

Pendapat Bapak/Ibu sangat bermanfaat dalam rangka perbaikan kualitas layanan kami.

Kami berharap Bapak/Ibu menyampaikan pendapat secara obyektif sesuai dengan pengalaman yang dialami ketika menerima layanan dari kami. Pendapat Bapak/Ibu sangat bermanfaat untuk upaya-upaya perbaikan kualitas pelayanan pada unit kerja kami.

Data identitas dan opini Bapak/Ibu akan kami rahasiakan dengan sebaik- baiknya.

Atas kerja sama dan partisipasi Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*** Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi**

1. Tanggal Pengisian *

Contoh: 7 Januari 2019

2. Nama Lengkap *

3. Jenis Kelamin *

Tandai satu oval saja.

☐ Laki - Laki

☐ Perempuan

4. Usia *

Tandai satu oval saja.

- ☐ Dibawah 20 Tahun
- ☐ 20 - 30 Tahun
- ☐ 31 - 40 Tahun
- ☐ 41 - 50 Tahun
- ☐ Di atas 50 Tahun

5. Pendidikan Terakhir *

Tandai satu oval saja.

- ☐ SD
- ☐ SMP
- ☐ SMA/SMK
- ☐ Diploma
- ☐ S1
- ☐ S2
- ☐ Yang lain: _____

6. Pekerjaan *

Tandai satu oval saja.

- ☐ PNS/TNI/POLRI
- ☐ Pegawai/Karyawan Swasta
- ☐ Wiraswasta/Usahawan
- ☐ Pelajar/Mahasiswa
- ☐ Yang lain: _____

Kuisisioner

Mohon mengisi seluruh kuisisioner di bawah ini.

7. U1. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan pada Loka Veteriner Jayapura? *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4

Tida ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Sesuai

8. U2. Bagaimana pendapat saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini? *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4

Tida ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Mudah

9. U3. Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan? *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4

Lam ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Cepat (Sesuai Janji Layanan)

10. U4. Apakah tarif yang ditarik oleh Loka Veteriner Jayapura sesuai dengan peraturan yang berlaku? *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4

Tida ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Sesuai

11. U5. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan? *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4

Tida ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Sesuai

12. U6. Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan? *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4

Tida ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Kompeten

13. U7. Bagaimana pendapat saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan? *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4

Tida ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Sopan/Ramah

14. U8. Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana? *

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4

Bur ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Baik

15. U9. Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan ? *
- 1 : Tidak ada
2 : Ada, tetapi tidak berfungsi
3 : Berfungsi kurang maksimal
4 : Dikelola dengan baik

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4

Tida ☐ ☐ ☐ ☐ Dikelola Dengan Baik

16. **Saran/Pendapat** *
- Masukan anda menjadi semangat kami untuk meningkatkan pelayanan lebih baik lagi.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

KERTAS KERJA PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LOKA VETERINER JAYAPURA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2024

RESPONDEN	NILAI PER UNSUR LAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	4	4	3	4
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	4	4	4	4	4	4	4	3	4
6	4	4	3	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	3	4	4	4	3	4	4	3	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	3	4
11	3	3	3	4	4	3	4	3	4
12	3	2	3	3	3	3	3	2	3
13	3	3	3	3	3	3	3	3	4
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	3	4
16	4	4	3	4	3	3	3	3	3
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	3	3	3	4	4	4	3	4	3
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	3	3	3	3	3	3	3	4	3

- Keterangan:
- U1 = persyaratan (teknis & administratif)
- U2 = sistem, mekanisme dan prosedur
- U3 = waktu penyelesaian
- U4 = biaya/ tarif
- U5 = produk spesifikasi jenis pelayanan
- U6 = kompetensi pelaksana
- U7 = perilaku pelaksana
- U8 = sarana dan prasarana
- U9 = penanganan pengaduan, saran dan masukan

KATEGORI			
Nilai Persepsi	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	C	Kurang Baik
3	3,064 - 3,532	B	Baik
4	3,5324 - 4,00 A	A	Sangat Baik

HASIL IKM LOKA VETERINER JAYAPURA

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

LOKA VETERINER JAYAPURA

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

SEMESTER I PERODE JANUARI - JUNI 2024

NILAI IKM

89,52

A (Sangat Baik)

NAMA UNIT : LOKA VETERINER JAYAPURA

RESPONDEN

JUMLAH : 65 Orang

JENIS KELAMI : L : 32 Orang P : 33 Orang

PENDIDIKAN : SD : - Orang

SMP : 1 Orang

SMA : 9 Orang

Diploma : 9 Orang

S1 : 34 Orang

S2 Keatas : 12 Orang

Periode Survey : 1 Jan 2024 s/d 30 Juni 2024

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN

MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI

DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

NILAI IKM UNIT PELAYANAN

A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00

B (Baik) : 76,61 - 88,30

C (Kurang Baik) : 65 - 76,60

D (Tidak Baik) : 25 - 64,99

TESTIMONI

PENGUNA LAYANAN LOKA VETERINER JAYAPURA



kementan
Kementerian Pertanian
Republik Indonesia

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LOKA VETERINER JAYAPURA

CLIENT TESTIMONIAL



Magdalena Ema Minang, S. Pt
★★★★★

Lokavet Jayapura Terbaik dalam pelayanan bermutu, berkualitas, terpercaya, dari ufuk timur untuk Indonesia

0967- 5572906

LOKA VETERINER JAYAPURA

CLIENT TESTIMONIAL



Iwung Sri Suryaningsih
★★★★★

Kerjasama loka veteriner dan daerah lebih dipererat agar daerah terbebas dari penyakit menular ternak yang berbahaya.

0967- 5572906

LOKA VETERINER JAYAPURA

CLIENT TESTIMONIAL



Jackson Metubun
★★★★★

Trimakasih Kepada Loka Veteriner, semua data yang saya isi sesuai dengan kinerja yang saya liat selama mendapatkan pelayanan dari Loka Veteriner.

0967- 5572906

LOKA VETERINER JAYAPURA

CLIENT TESTIMONIAL



Gaspar Taudufu
★★★★★

Trimakasih Kepada Loka Veteriner, semua data yang saya isi sesuai dengan kinerja yang saya liat selama mendapatkan pelayanan dari Loka Veteriner.

0967- 5572906

LOKA VETERINER JAYAPURA

CLIENT TESTIMONIAL



Viktor Alfredo Puy
PNS
★★★★★

Good. Monitoring dan surveillance lebih sering lagi untuk menjaga Provinsi Papua selalu aman dari ancaman penyakit hewan.

0967- 5572906

LOKA VETERINER JAYAPURA

CLIENT TESTIMONIAL



Woro Kustini
★★★★★

Pertahankan dan tingkatkan pelayanan utk masyarakat . Semoga Lokavet Koya semakin jaya .

0967- 5572906

LOKA VETERINER JAYAPURA

CLIENT TESTIMONIAL



Fitria Sayuri
★★★★★

Terus meningkatkan kualitas pelayanan dan secepatnya bisa Akreditasi.

0967- 5572906

LOKA VETERINER JAYAPURA

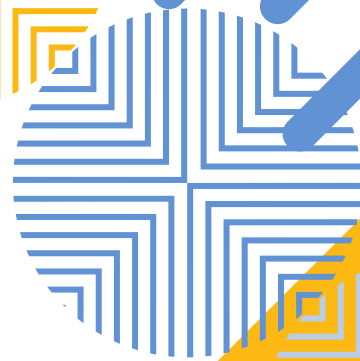
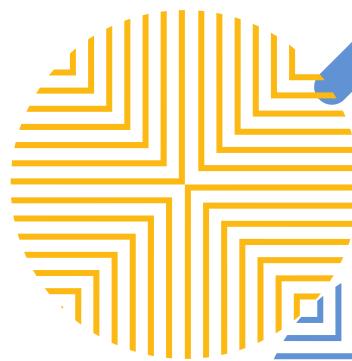
CLIENT TESTIMONIAL



Yohanes Don Bosco Warbal,SE,MM
PNS
★★★★★

Pelayanan ke daerah daerah selama ini sangat bagus, mohon di tingkatkan lagi.

0967- 5572906



LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Loka Veteriner Jayapura
Semester II Tahun 2024

Disusun Oleh :
Tim Kerja Ketatausahaan dan Pelayanan Teknis



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

**LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
LOKA VETERINER JAYAPURA
SEMESTER II TAHUN 2024**



**LOKA VETERINER JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Dasar Hukum Pelaksanaan.....	7
C. Maksud dan Tujuan.....	8
BAB II PENGUMPULAN DATA SKM.....	9
A. Definisi Survei.....	9
B. Metode Pengumpulan Data.....	9
C. Lokasi Pengumpulan Data.....	11
D. Waktu Pelaksanaan SKM.....	11
E. Penentuan Jumlah Responden.....	12
BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA.....	13
A. Jumlah Responden SKM.....	13
B. Nilai IKM Per Unsur Layanan.....	16
BAB IV ANALISIS HASIL SKM.....	17
A. Analisis Masalah/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan.....	17
B. Rencana Tindak Lanjut.....	18
BAB V PENUTUP.....	19
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan SKM	11
Tabel 2. Data Responden Pengisian Kuisisioner SKM.....	13
Tabel 3. Detail Nilai SKM Per Unsur.....	15
Tabel 4. Rencana Tindak Lanjut	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Tabel <i>Krejcie and Morgan</i>	12
Gambar 2. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	14
Gambar 3. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	14
Gambar 4. Jumlah Responden Berdasarkan Usia	14
Gambar 5. Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	15
Gambar 6. Grafik Nilai SKM Per Unsur	16
Gambar 7. Hasil Nilai SKM Per Unsur Layanan	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamalkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pelayanan publik yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kinerja pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel semakin meningkat. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap UPT untuk selalu mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Loka Veteriner Jayapura sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Loka Veteriner Jayapura memiliki tugas

untuk melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian, diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Loka Veteriner Jayapura menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian produk hewan, serta pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian;
- d. Pelaksanaan surveilans penyakit hewan, dan produk hewan;
- e. Pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- f. Penyusunan jenis, status situasi dan peta penyakit hewan wilayah kerjanya;
- g. Pelaksanaan pengujian forensik veteriner;
- h. Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat;
- i. Pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan;
- j. Pelaksanaan dan pemberian layanan bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan, penanggulangan penyakit hewan, dan kesejahteraan hewan;
- k. Pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner;
- l. Pelaksanaan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan;
- m. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- n. Pengujian residu obat hewan dan cemaran mikroba;
- o. Pemberian pelayanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk hewan;
- p. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan;
- q. Pelaksanaan diseminasi informasi veteriner;

- r. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara Loka Veteriner Jayapura.

Salah satu cara untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan di Loka Veteriner Jayapura sebagai salah satu penyedia layanan publik di wilayah kerja yang mencakup Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik yang berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017. Hasil SKM didapat dengan merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat dan dielaborasi dengan metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat sehingga didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei kepuasan masyarakat ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik dalam hal ini Loka Veteriner Jayapura untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga peningkatan kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

C. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan pengamatan dan pengidentifikasian, diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan yang telah diberikan oleh Loka Veteriner Jayapura.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

A. Definisi Survei

Survei merupakan teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data; penyelidikan; peninjauan dapat juga dikatakan sebagai suatu pencarian data untuk menemukan suatu nilai dengan batasan-batasan tertentu terkait sehingga dapat dikatakan Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Pada dasarnya pedoman pelaksanaan survei kepuasan masyarakat sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik

B. Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner digital (*google form*) yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuisisioner SKM Loka Veteriner Jayapura yaitu:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/ Tarif

Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas yang ditunjukkan dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

C. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di wilayah pelayanan Loka Veteriner Jayapura dan pengumpulan data dilakukan secara online melalui media google form pada tautan <https://s.id/SurveyKepuasanMasyarakatLokavet> Rentang waktu pengisian survei dilaksanakan periodik selama 2 periode triwulan yaitu:

1. Triwulan ke III pada 20 s.d 30 Agustus 2024
2. Triwulan ke IV pada 23 s.d 31 Oktober 2024

Pengisian kuisisioner dilakukan mandiri oleh para responden yang pernah dan menerima layanan Loka Veteriner Jayapura

D. Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara berkala dengan jangka waktu selama 1 (satu) Semester dan dibagi dalam dua periodik triwulan III dan triwulan IV, untuk penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Semester 2 ini memerlukan waktu kurang lebih 2 pekan atau 14 hari dengan rincian proses penyusunan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1	Persiapan(Penyiapan Form SKM dan target responden)	Triwulan III 15 s.d 16 Agustus 2024	2 Hari Kerja
		Triwulan IV 21 s.d 22 Oktober 2024	2 Hari Kerja
2	Pengumpulan Data/Pengisian Kuisisioner	Triwulan III 20 s.d 30 Agustus 2024	8 Hari Kerja
		Triwulan IV 23 s.d 31 Oktober 2024	6 Hari Kerja
3	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	1 s.d 5 November 2024 (2 Triwulan)	3 Hari Kerja
4	Penyusunan dan Pelaporan	6 s.d 15 November 2024 (2 Triwulan)	8 Hari Kerja

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan SKM

E. Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah penerima layanan dari seluruh jenis pelayanan pada Loka veteriner Jayapura berdasarkan periode survei sebelumnya. Total penerima layanan pada Loka Veteriner Jayapura dalam kurun waktu semester II (triwulan 1 dan 2) adalah sebanyak 75 orang/responden/pemohon, dengan jumlah responden dipilih dari setiap jenis layanan yang dimiliki Loka Veteriner Jayapura. Jumlah responden dihitung menggunakan tabel sampel dari *Krejcie and Morgan*. Berdasarkan Tabel *Krejcie and Morgan*, jumlah minimum sampel responden SKM adalah 63 responden.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

Gambar 1. Tabel *Krejcie and Morgan*

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

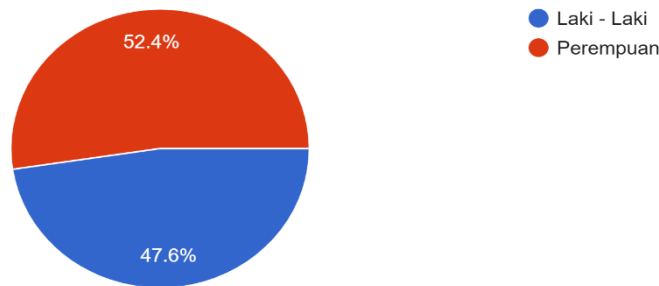
A. Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh dan melakukan pengisian kuisisioner yaitu sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang responden selama waktu pengisian Triwulan III dan IV dengan rincian dalam tabel dan diagram per unsur sebagai berikut:

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERCENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki Laki	30	46,15%
		Perempuan	35	53,85%
2	Pendidikan	SD Ke Bawah	0	0%
		SLTP	0	0%
		SMA/SMK	7	10,76%
		Diploma	3	4,61%
		Strata 1	36	55,38%
		Strata 2	18	27,69%
		Strata 3	1	1,53%
3	Pekerjaan	PNS/TNI/Polri	46	56,9%
		Pegawai/Karyawan Swasta	9	15,4%
		Wiraswasta/Usahawan	0	15,4%
		Pelajar/Mahasiswa	8	4,6%
		Lainnya	2	7,5%
4	Usia	Di bawah 20 Tahun	2	4,6%
		20 - 30 Tahun	14	20%
		31 - 40 Tahun	26	36,9%
		41 - 50 Tahun	20	24,6%
		Di atas 50 Tahun	3	13,8%

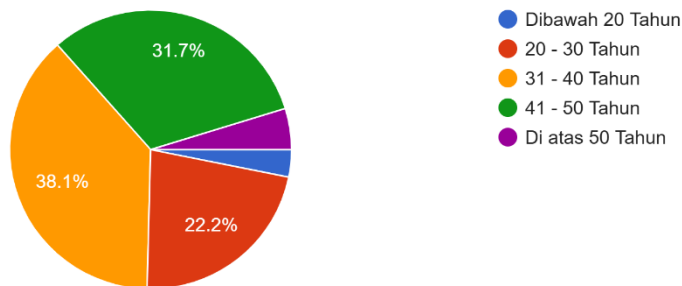
Tabel 2. Data Responden Pengisian Kuisisioner SKM

Jenis Kelamin
63 responses



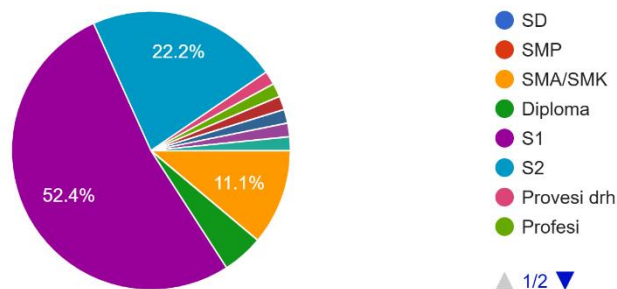
Gambar 2. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Usia
63 responses



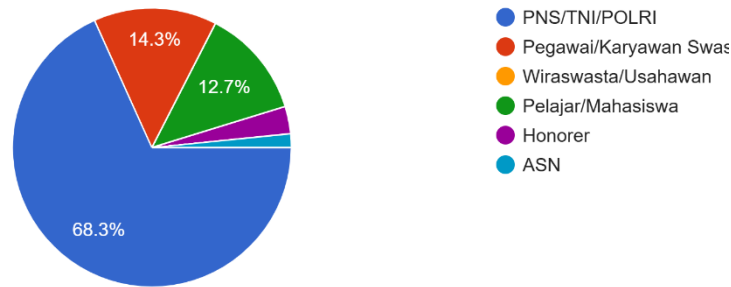
Gambar 3. Jumlah Responden Berdasarkan Usia

Pendidikan Terakhir
63 responses



Gambar 4. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pekerjaan
63 responses



Gambar 5. Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan

B. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

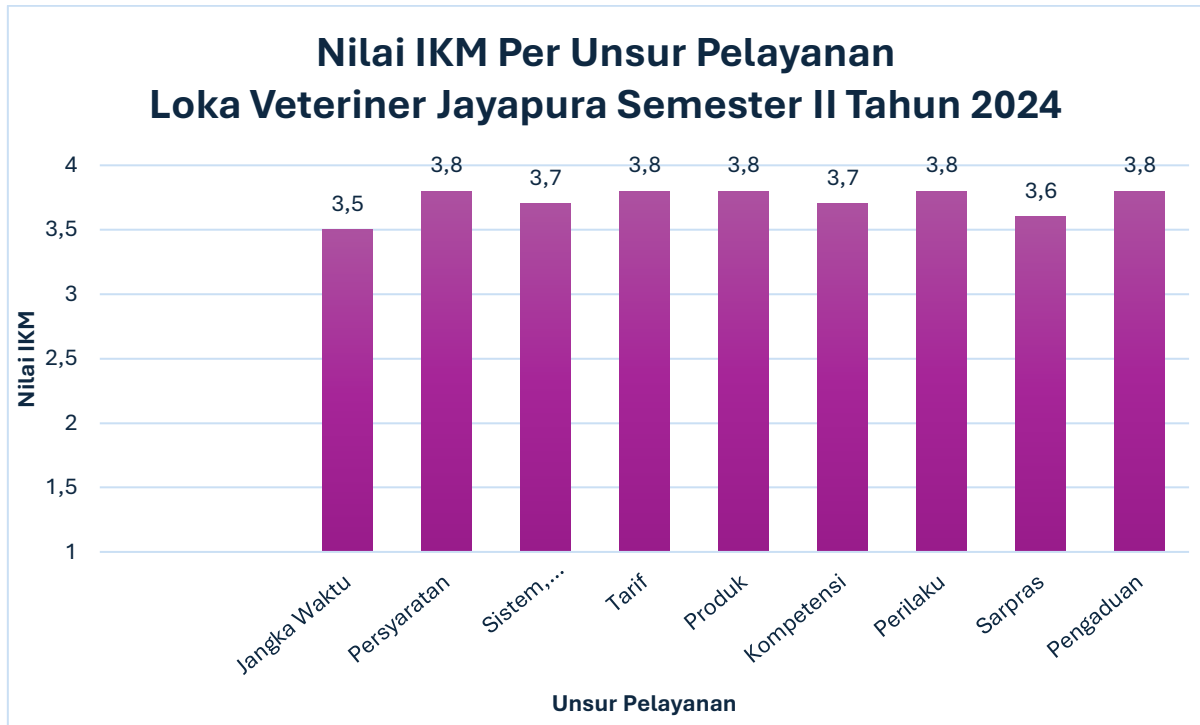
Pengolahan data SKM menggunakan aplikasi pengolah data Microsoft Excel dan merupakan penggabungan responden dari 2 Triwulan (Triwulan III dan IV) diperoleh hasil sebagai berikut :

NILAI UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	3,55	3,82	3,7	3,76	3,76	3,67	3,82	3,64	3,82
Kategori	B	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	93,09 3,72 (Nilai A atau Sangat Baik)								

Tabel 3. Detail Nilai SKM Per Unsur

Keterangan:

U1 = persyaratan; U2 = sistem, mekanisme dan prosedur; U3 = waktu penyelesaian; U4 = biaya/ tarif; U5 = produk spesifikasi jenis pelayanan; U6 = kompetensi pelaksana; U7 = perilaku pelaksana; U8 = sarana dan prasarana; U9 = penanganan pengaduan, saran dan masukan.



Gambar 6. Grafik Nilai SKM Per Unsur Layanan



Gambar 7. Hasil Nilai SKM Per Unsur Layanan

BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

A. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Jangka waktu pelayanan mendapatkan nilai Baik (berada pada skala 3,5); dan
2. Sedangkan 8 Unsur lainnya (persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana prasarana, dan penanganan pengaduan, saran dan masukan) mendapatkan nilai Sangat Baik dengan nilai tertinggi pertama adalah pada unsur persyaratan, tarif layanan, produk layanan, perilaku petugas, dan layanan pengaduan disusul dengan unsur sistem, mekanisme dan prosedur, serta kompetensi petugas layanan pada nilai tertinggi kedua.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Proporsi jumlah pegawai teknis/pelaksana teknis yang tersedia pada Loka Veteriner Jayapura sangat kurang dari jumlah kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan, sehingga mengakibatkan beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan layanan terkadang beririsan dengan beberapa tugas lainnya di luar dari tugas layanan. (Undangan Kegiatan, Rapat Daring/Luring, dll) hal ini secara tidak langsung berdampak terhadap waktu penyelesaian layanan,
2. Selain itu untuk beberapa kasus khususnya layanan investigasi yang harus dilakukan di beberapa daerah yang sulit diakses, daerah rawan, serta minim akses transportasi baik udara maupun darat mengakibatkan kinerja layanan petugas teknis Loka Veteriner Jayapura membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian layanan.

B. Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut di atas dilakukan dalam rangka perbaikan kualitas layanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya yaitu jangka waktu penyelesaian layanan dan disusul oleh unsur lainnya. Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan secara internal pada tahun berjalan. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

NO	PRIORITAS UNSUR	RENCANA AKSI (PROGRAM/KEGIATAN)	WAKTU			PENANGGUNG JAWAB
			Jangka Pendek (Tahun Berjalan) Semester II	Jangka Menengah (12 s.d 24 Bulan)	Jangka Panjang (> 24 Bulan)	
1.	Kemudahan Prosedur Layanan	Pembaharuan Prosedur Layanan khususnya untuk layanan utama pengujian	-	v	v	Ketua Tim Kerja dan PJ. Info vet
		Peningkatan akses dan informasi terhadap prosedur layanan	v	v	v	Ketua Tim Kerja dan PJ. Infovet
2.	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	Usulan Kebutuhan ASN untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis	v	v	v	Kepala, Ketua Tim Kerja Yantek dan Ketatausahaan
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga teknis eksisting	-	v	v	Ketua Tim Kerja Yantek dan Ketatausahaan
3	kualitas sarana dan prasarana.	Penyediaan sarana prasarana habis pakai	-	v	v	Ketua Tim Kerja, PJ. Pengadaan

Tabel 4. Rencana Tindak Lanjut

BAB V

PENUTUP

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Loka veteriner Jayapura selama Semester II (Juli-Desember) dalam periode 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik pada Loka Veteriner Jayapura , secara umum mencerminkan tingkat kualitas dengan nilai A (Sangat Baik) dengan nilai SKM **93,09** dengan interval indeks **3,72**. Meskipun demikian, nilai SKM Loka Veteriner Jayapura menunjukkan perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan penilaian SKM pada Semester I Tahun 2024 yang mendapatkan nilai 89,52 perubahan ini disebabkan karena peningkatan kualitas pada beberapa unsur layanan khususnya komitmen petugas layanan dalam melayani Masyarakat dan memberikan hasil yang terbaik. konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tetap konsisten dengan predikat Sangat Baik.
2. Jangka waktu pelayanan mendapatkan nilai Baik (berada pada skala 3,5) angka ini tetap seperti nilai SKM Semester I disebabkan oleh beberapa hal diantaranya proporsi jumlah pegawai teknis/pelaksana teknis yang tersedia pada Loka Veteriner Jayapura sangat kurang dari jumlah kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan, sehingga mengakibatkan beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan layanan terkadang beririsan dengan beberapa tugas lainnya di luar dari tugas layanan, selain itu untuk beberapa kasus khususnya layanan investigasi yang harus dilakukan di beberapa daerah yang sulit diakses, daerah rawan, serta minim akses transportasi baik udara maupun darat mengakibatkan kinerja layanan petugas teknis Loka Veteriner Jayapura membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian layanan.
3. Sedangkan 8 unsur layanan lainnya dengan nilai A (sangat Baik) akan terus dipertahankan melalui evaluasi secara berkala dan peningkatan layanan secara konsisten.

4. Pimpinan beserta seluruh pegawai Loka Veteriner Jayapura berkomitmen untuk menjalankan rencana aksi tindak lanjut yang telah ditetapkan dan mempertahankan kinerja yang telah dicapai atas hasil survei IKM serta mengoptimalkan pelayanan Loka Veteriner Jayapura kepada masyarakat dan seluruh mitra kerja.

Jayapura, 22 November 2024

Kepala Loka Veteriner Jayapura



drh. Tri Juvianto

NIP. 197801202009011010

DOKUMENTASI

Rapat Pembahasan Rencana Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Semester II TA 2024, dan pembagian tugas dan tanggung jawab tiap PJ. untuk menyampaikan Form Survei Kepuasan Masyarakat kepada Responden sesuai wilayah kerjanya.



